



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG**

JL.P. DIPONEGORO NO.101 ☎ 691033 FAX. 691033
REMBANG 59211
E-MAIL : DPUTARU@REMBANGKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025* dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun 2025. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

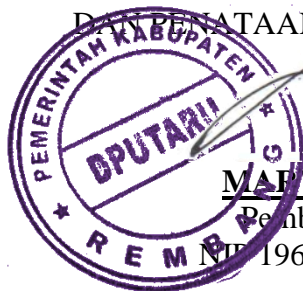
Tahun 2025 memiliki arti strategis karena merupakan masa transisi antara pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 dengan awal implementasi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029. Penyusunan LKjIP ini tidak hanya merefleksikan pencapaian terhadap target kinerja periode berjalan, tetapi juga menjadi dasar evaluasi perencanaan pembangunan ke depan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang baru.

Masukan dan saran sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan kebijakan, serta peningkatan kinerja dinas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rembang, Februari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KAB. REMBANG



MALYOSA, A.TD., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19671211 199003 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan”

- Diukur dengan Indeks Aksesibilitas Jalan dengan rumus perhitungan Indikator (panjang jalan kondisi mantap)/(Luas Wilayah Administrasi).
Panjang Jalan Kondisi Mantap = Panjang Jalan Kondisi Baik+Panjang Jalan Kondisi Sedang. Panjang Jalan Kondisi Baik (252,40 km) + Panjang Jalan Kondisi Sedang 171,38 km dibagi 1.014,10 km.
- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan.
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 sebesar 0,52 terealisasi sebesar 0,41. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 78,85% kategori tinggi.
- Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2023 sebesar 0,41 target Tahun 2024 yaitu sebesar 0,41 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 0,41 cukup baik.

2. Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Akses Layanan Dasar”

- Diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar dengan rumus perhitungan (Capaian Air Minum+Air Limbah Domestik+persampahan)/3.
- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan.
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 sebesar 79,20 terealisasi sebesar 74,84 . Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 94,49% kategori sangat tinggi.
- Capaian target Tahun 2025 sebesar 74,84 mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebesar 73,44.

3. Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air”

- Diukur dengan Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku dengan rumus perhitungan $(\text{jumlah ketersediaan air baku})/(\text{kebutuhan air baku}) \times 100\%$.
- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 sebesar 60% terealisasi sebesar 46,01%. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 76,68% kategori tinggi.
- Capaian target dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Tahun 2023 sebesar 30,70%, Tahun 2024 sebesar 40,43% dan Tahun 2025 sebesar 46.01%.

4. Capaian Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah”

- Diukur dengan Indikator Kinerja Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang dengan rumus perhitungan $(\text{jumlah dokumen RTR yang ditetapkan})/(\text{jumlah dokumen RTR yang direncanakan}) \times 100\%$.
- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 sebesar 9 terealisasi sebesar 4. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 44,44% kategori sangat rendah.
- Capaian Tahun 2025 yaitu 4 dokumen, Tahun 2024 tercapai 4 dokumen, Tahun 2023 tercapai 3 dokumen cukup mengalami peningkatan.

5. Capaian Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi”

- Diukur dengan rumus perhitungan $(\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun } (n) - \text{bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksi tahun } (n- 1))/(\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun } n-1) \times 100\%$.

- Capaian Indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program, yaitu Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Target Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 sebesar 50% terealisasi sebesar 33,33%. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 66,66% kategori sedang.
- Tahun 2025 realisasi sebesar 33,33% mengalami peningkatan dari Tahun 2024 sebesar 31,95%, dan Tahun 2023 sebesar 47,30% cukup mengalami peningkatan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan efisien dan tepat guna dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Ketersediaan infrastruktur jalan kondisi mantap untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerataan layanan pada wilayah yang masih tertinggal dalam akses layanan dasar.
4. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pelayanan air limbah untuk mendukung perluasan cakupan.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur air dengan membangun, merehabilitasi bendungan, waduk dan saluran air guna mendukung ketahanan pangan daerah.
6. Menggalakkan penghijauan dan perlindungan daerah resapan air.
7. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam menjaga dan mengelola sumber daya air.
8. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam penyusunan tata ruang daerah.
9. Pemenuhan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dibidang bangunan dan jasa konstruksi untuk mendukung kinerja bangunan dan jasa konstruksi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Casacading dan Struktur Organisasi	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi Perangkat Daerah	6
1.4 Isu-Isu Stategis Perangkat Daerah	10
1.5 Data Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah.....	13
1.6 Data Sarana dan Prasarana/BMD.....	17
1.7 Anggaran Tahun 2026 dan Tahun 2025	19
1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024	20
1.9 Dasar Hukum.....	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	32
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	34
2.3 Struktur Anggaran	36
2.4 Perjanjian Kinerja	44
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	56
3.1.1 Realisasi dan capaian Kinerja PK Tahun 2025	56
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024	59
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Organisasi.....	61
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten	63
3.1.5 Membandingkan Realisasi dan Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	68
3.1.6 Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	79
3.2 Realisasi Anggaran	84
3.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025	84

3.2.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai kinerja	85
3.3 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	86
3.4 Lintas Sektor	95
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	100
4.1.1 Realisasi kinerja PD berdasarkan target yang ditetapkan	100
4.1.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja PD	101
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah	101
LAMPIRAN	
SK IKU	
PK Kepala PD tahun n	
SK Tim Penyusun LKjIP	
SK SOP Pengumpulan Data Kinerja	
Profil Indikator	
Pohon Kinerja	
Cascading	
Piagam Penghargaan	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2024.....	13
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 1.3	Komposisi ASN DPUTARU Kabupaten Rembang	14
Tabel 1.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.....	17
Tabel 1.5	Anggaran Tahun 2024 dan 2025.....	19
Tabel 1.6	Sumber Dana Anggaran Tahun 2025.....	20
Tabel 1.7	Rekapitulasi Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal Sakip Tahun 2025.....	20
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	32
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025.....	33
Tabel 2.3	Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	35
Tabel 2.4	Struktur, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	37
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2025.....	44
Tabel 2.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang Tahun 2025.....	45
Tabel 3.1	Tabel Pengkategorian Capaian Kinerja.....	57
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	58
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja.....	59
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	61
Tabel 3.5	Persentase Jalan Mantap	64
Tabel 3.6	Persentase Daerah Irigasi terlayani Jaringan Irigasi	65
Tabel 3.7	Persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman.....	66
Tabel 3.8	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman.....	67
Tabel 3.9	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.....	67
Tabel 3.10	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	68
Tabel 3.11	Jenis Pelayanan Dasar	75
Tabel 3.12	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	76
Tabel 3.13	Anggaran Pencapaian SPM	76
Tabel 3.14	Jumlah Personil Pengampu SPM.....	76

Tabel 3.15	Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Air Minum Sehari-hari.....	77
Tabel 3.16	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar air minum..	77
Tabel 3.17	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.....	78
Tabel 3.18	Indeks Pencapaian Mutu SPALD.....	78
Tabel 3.19	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025.....	78
Tabel 3.20	Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian SPM.....	79
Tabel 3.21	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah Anggaran Pencapaian SPM.....	79
Tabel 3.22	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran per Sasaran Tahun 2025.....	84
Tabel 3.23	Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya.....	85
Tabel 3.24	Kegiatan Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading DPUTARU.....	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang.....	5
Gambar 1.3	Peta Jabatan Persediaan dan Kebutuhan Pegawai	16
Gambar 2.1	Aplikasi SIPD	53
Gambar 2.2	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54
Gambar 2.3	Aplikasi SRIKANDI	54
Gambar 2.4	Aplikasi LAPOR	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

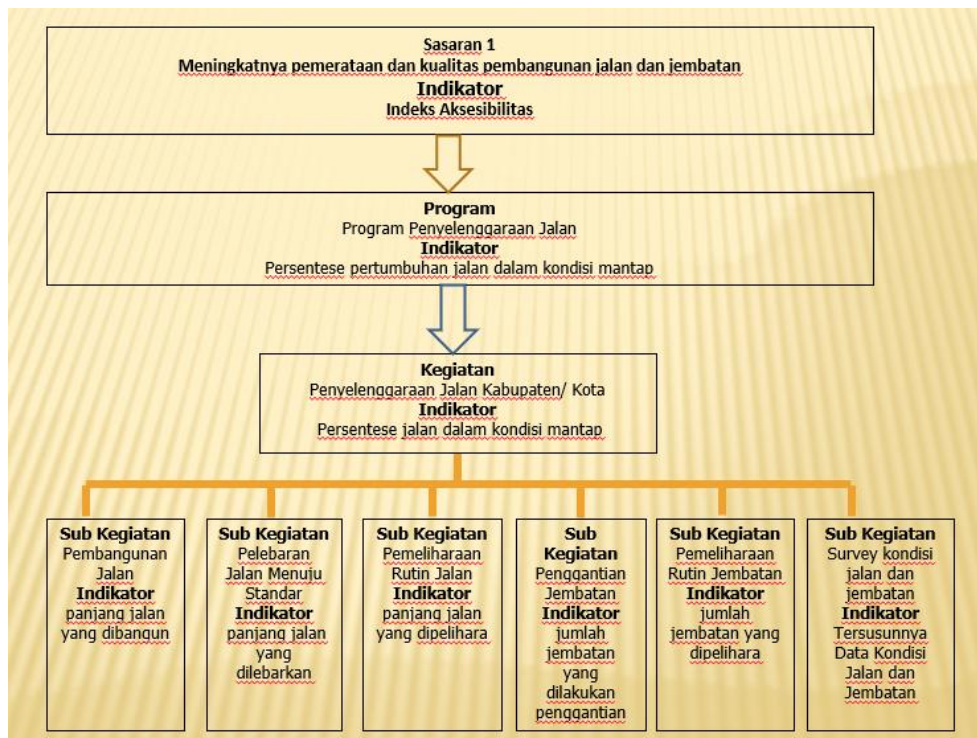
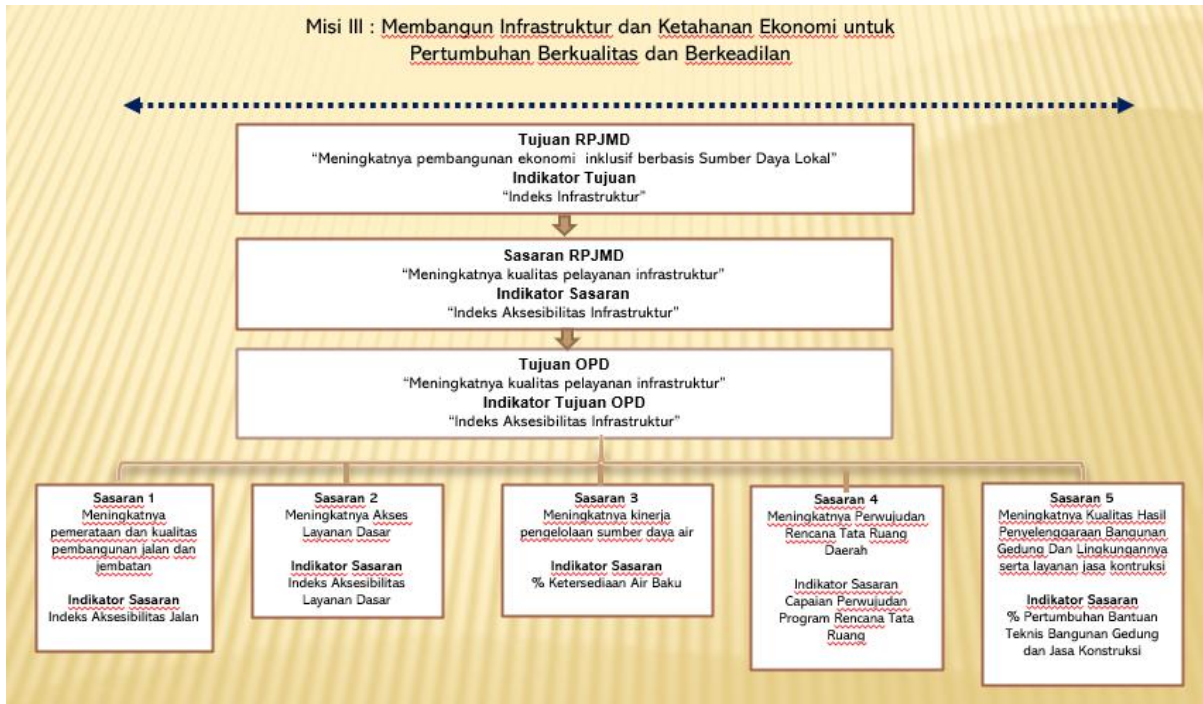
Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

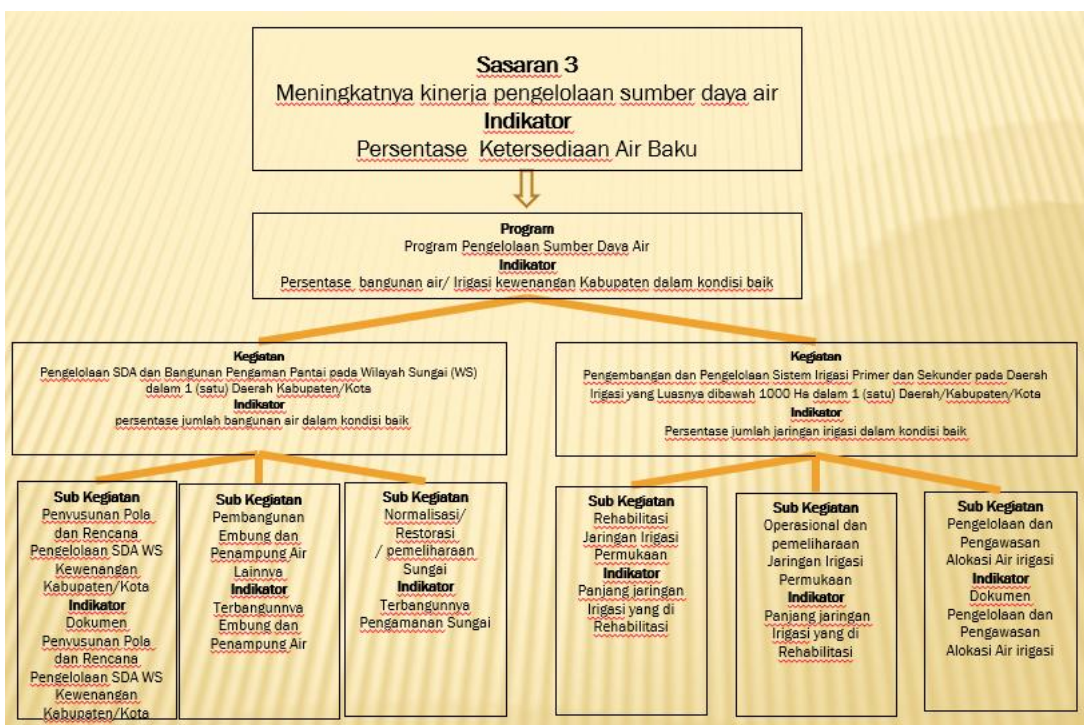
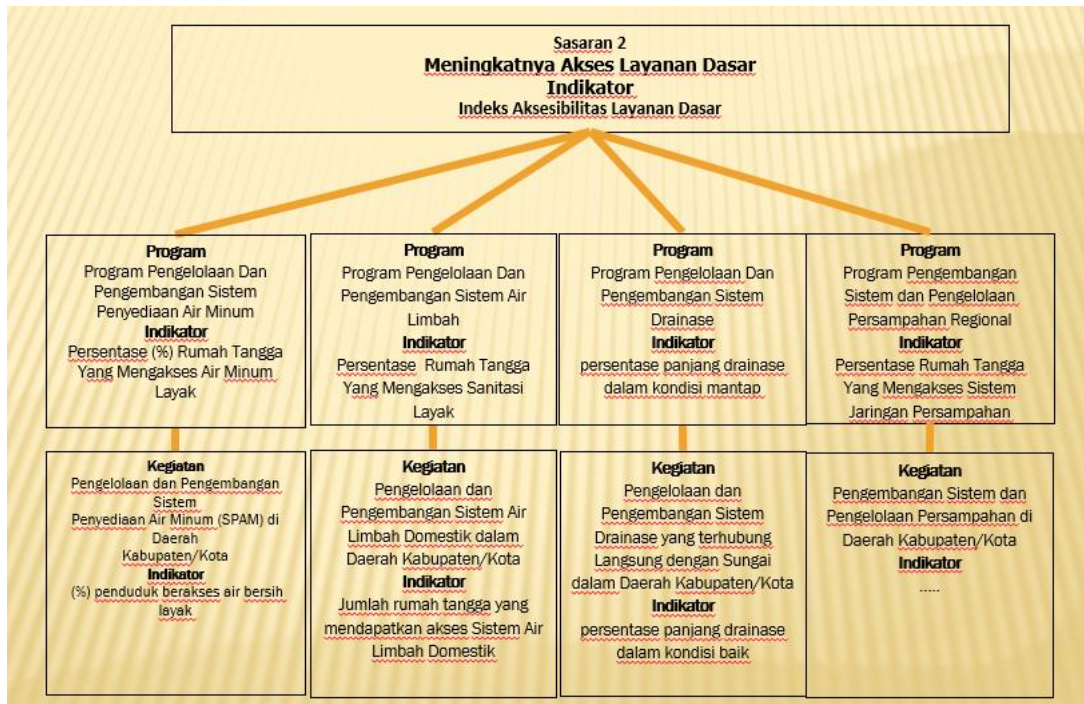
Penyusunan LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

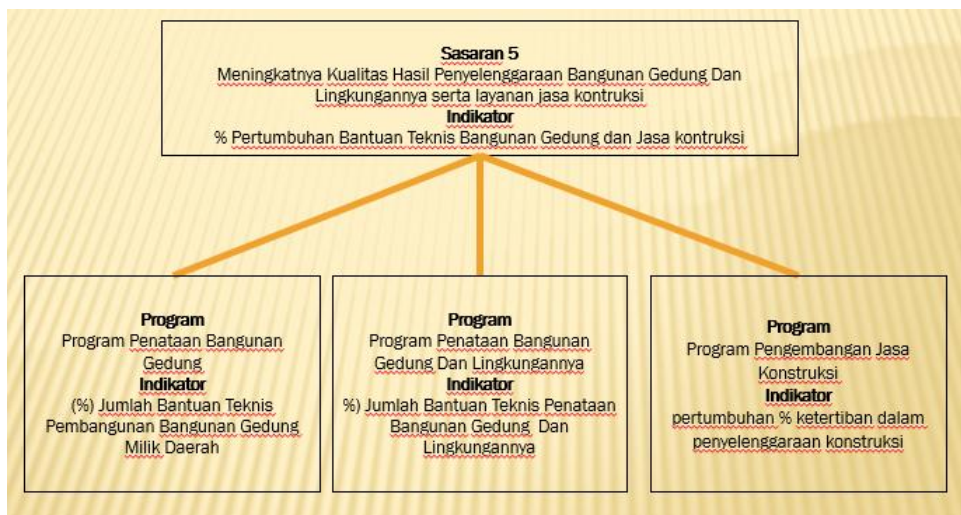
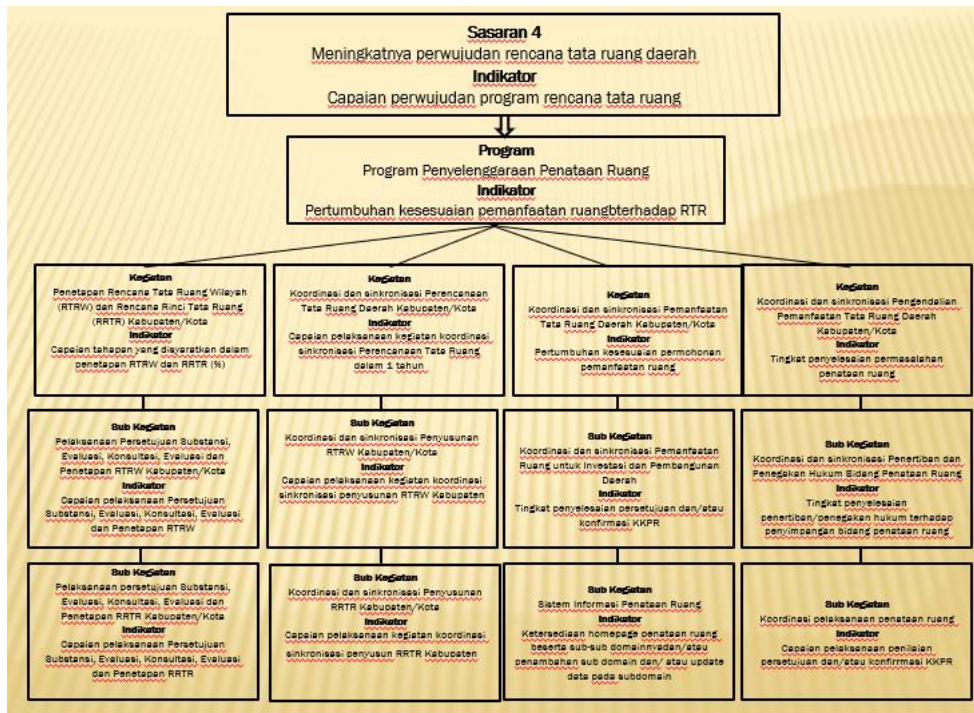
1.2 Cascading dan Struktur Organisasi sebagai dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Renstra 2021-2026.

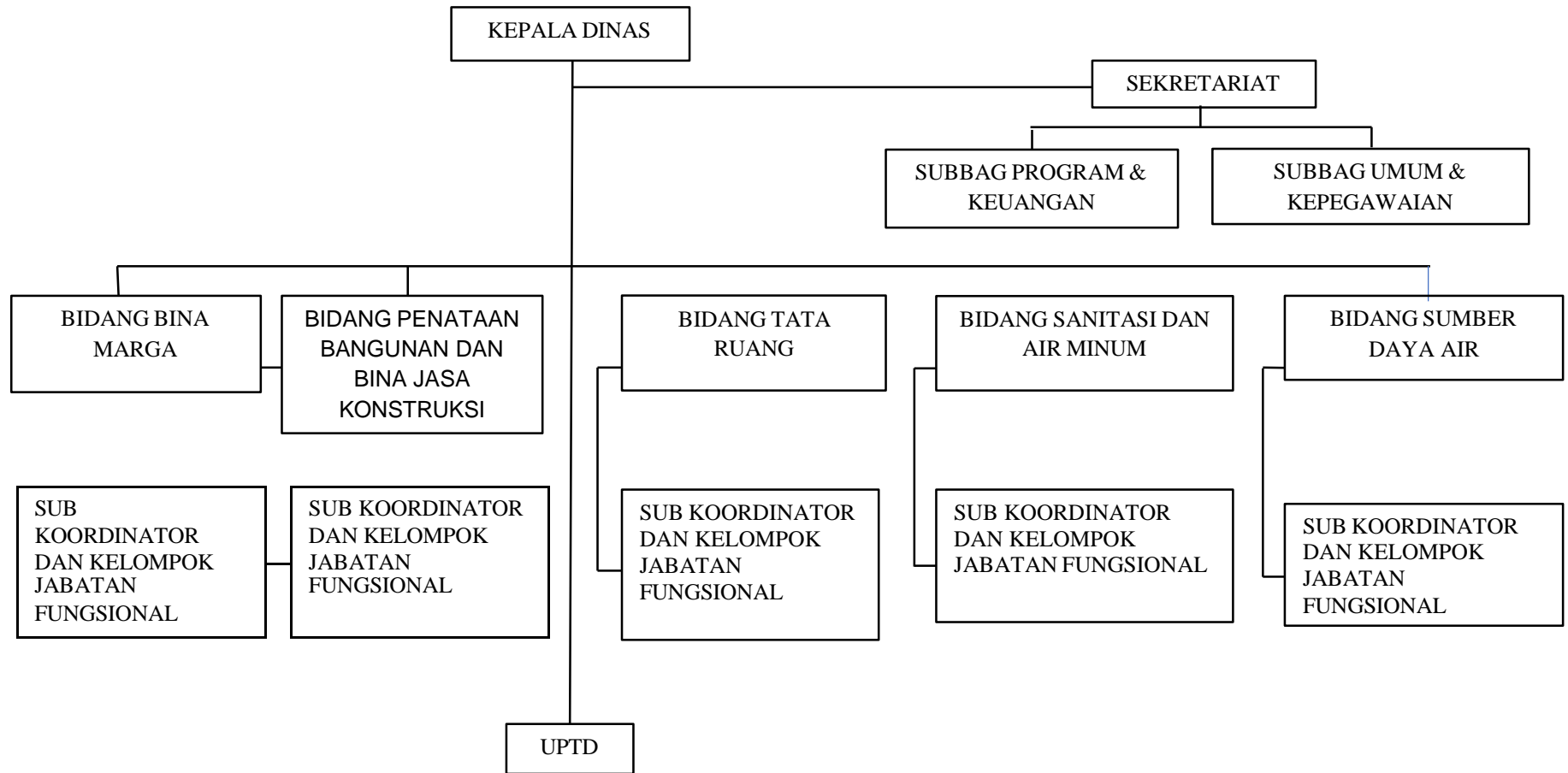
Gambar 1.1 Cascading DPUTARU







Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang :
 Gambar 1.2 Struktur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Sumber: Peraturan Bupati No 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

1.3 Aspek Strategis Organisasi Perangkat Daerah

a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris terdiri dari :

1. Ka Sub Bagian Program dan Keuangan terdiri dari :

- Penata Keuangan
- Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
- Pengelola Keuangan
- Pengelola Gaji

2. Ka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari :
 - Analis Kelembagaan
 - Pengelola Kepegawaian
 - Pengadministrasi Umum
 - Petugas Keamanan
 - Pengemudi
- c. Kepala Bidang Bina Marga terdiri dari :
 1. JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya
 2. JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
 3. Sub Koordinasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi
 - Analis Jalan Jembatan
 - Pengawas Jalan dan Jembatan
 - Pengelola Sistem Manajemen Jalan
 - JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
 4. Sub Koordinasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan
 - Pengelola Pemeliharaan Jalan
 - Pemelihara Jalan
 - JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
 5. Sub Koordinasi Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan
 - Analis Pengembangan Infrastruktur
 - Pengelola Kelengkapan Jalan
 - JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
 - Teknik Jalan dan Jembatan Terampil/Pelaksana
- d. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi terdiri dari:
 1. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya
 2. JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya
 3. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
 4. JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
 5. Sub Koordinator Penataan Bangunan
 - Analis Perumahan
 - Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan
 - Pengelola Bangunan Gedung

- JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
6. Sub Koordinator Bina Jasa Konstruksi
- Analis Bangunan dan Perumahan
 - Penelaah Mutu Konstruksi
 - Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan
 - JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama
- e. Kepala Bidang Tata Ruang terdiri dari :
1. JF Penata Ruang Madya
 2. JF Penata Ruang Ahli Muda
 3. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang
 - Analis Tata Ruang
 - Penyusun Rencana Tata Ruang
 - Pengelola Tata Ruang dan Konservasi Kawasan
 - JF Penata Ruang Ahli Pertama
 4. Sub Koordinator Pemanfaatan Tata Ruang
 - Analis Tata Ruang
 - Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan
 - JF Penata Ruang Pertama
 5. Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
 - Analis Tata Ruang
 - Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan
 - JF Penata Ruang Pertama
- f. Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum terdiri dari :
1. JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya
 2. JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
 3. Sub Koordinator Sanitasi
 - Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
 - Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan
 - Pengelola Penyehatan Lingkungan
 - JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
 - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
 - JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
 4. Sub Koordinator Penyediaan Air Minum

- Analis Sistem Mutu dan Lingkungan
 - Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi
 - JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
 - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
 - JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama
- g. Kepala Bidang Bidang Sumber Daya Air
1. JF Teknik Pengairan Ahli Madya
 2. JF Teknik Pengairan Ahli Muda
 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
 - Analis Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Pengawas Pengairan
 - Pengelola Sumber Daya Air
 - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
 - JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama
 4. Sub Koordinator Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Analis Potensi Sumber Air Tanah
 - Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
 5. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air
 - Pengelola Sumber Daya Air
 - Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - Penjaga Pintu Air
 - JF Teknik Pengairan Ahli Pertama
 - JF Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama
- h. Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan
1. Pengawas Sarana Bengkel
 2. Pengawas Pengoperasian Alat Berat
 3. Pengelola Bengkel
 4. Pemelihara Peralatan
 5. Operator Alat Berat

1.4 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Salah satu Isu Strategis Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah Belum optimalnya kinerja penataan ruang dan pelayanan infrastruktur. Aspek penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi permasalahan pokok karena belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. Adanya kesenjangan penyediaan infrastruktur ini mengakibatkan adanya kesenjangan pembangunan antara Wilayah Rembang bagian Utara dengan Wilayah Rembang bagian Selatan-Barat dan Selatan-Timur.

Penyediaan infrastruktur yang tidak merata juga mendorong terfokusnya pertumbuhan perkotaan sepanjang koridor Pantai Utara yang menyebabkan pengembangan wilayah tidak merata. Selain pemerataan penyediaan infrastruktur, keterpaduan pemanfaatan ruang juga masih cukup rendah, seperti jaringan transportasi, sumber daya air, telekomunikasi dan prasarana lingkungan permukiman dan fasilitas sosial ekonomi lainnya seperti pasar, sarana kesehatan, sekolah, sentrasentra produksi sehingga berdampak pada keterlambatan akses dan pelayanan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antarwilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kabupaten Rembang akan mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang adalah akses air baku bagi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. Kabupaten Rembang perlu memprioritaskan perluasan akses air minum, menghilangkan kawasan permukiman kumuh, dan memantapkan akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh kabupaten pada tahun 2025. Kabupaten Rembang memiliki persentase rumah tangga kumuh yang cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk mencapai target bebas kawasan kumuh.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang melingkupi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sebagai satu kesatuan, penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara terpadu agar terjadi koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pada berbagai tingkatan antarpemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pengaturan penataan ruang dengan tersedia dan terpenuhinya norma, standar, pedoman dan manual bisa menjembatani kepentingan antartingkat pemerintahan, antarsektor, antarwilayah sehingga terjadi proses pembangunan yang berkelanjutan di Rembang. Pembinaan berupa sosialisasi, pendikan, pelatihan dari pemerintah ke pemerintah daerah dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang tata ruang.

Pelaksanaan penataan ruang berupa penyusunan rencana tata ruang beserta rencana rinci sekaligus evaluasinya akan menjamin arah pembangunan berbasis spasial dengan menggerakkan sektor-sektor sebagai kegiatan untuk mengisi peruntukan ruang sesuai ketentuan sehingga produktivitas dan keberlanjutan bisa dilaksanakan secara aman, dan nyaman bagi semua

pemangku kepentingan. Termasuk menjamin percepatan pembangunan Kabupaten Rembang sebagai gerbang pertumbuhan di wilayah timur Jawa Tengah. Melalui pengawasan penataan ruang, perencanaan dan pelaksanaan dapat diarahkan pada kebijakan, rencana dan program yang sudah ditentukan sehingga tertib tata ruang terwujud.

Penataan ruang melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik menjadi salah satu tolak ukur yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Ketaatan pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan daya dukung air, Kabupaten Rembang mengalami defisit atau kekurangan sumber daya air pada tahun 2019, dan diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2030. Hal ini mengindikasikan, bahwa Kabupaten Rembang harus melakukan suatu usaha untuk menjaga ketersediaan sumber daya air dan menambah jumlah bangunan permanen air hujan. Usaha yang dilakukan terkait usaha menambah suplai air dan usaha pemanfaatannya secara efisien.

Pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah ketersediaan air baku melalui Pembangunan Embungisasi, Program Pengelolaan Sungai Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air. Pembangunan sumber daya air ini ditujukan untuk dapat mendukung kebutuhan perkembangan industri di Kabupaten Rembang. Sehingga berbagai proyek strategis pengembangan industri di Kabupaten Rembang yang telah direncanakan dapat dikembangkan secara maksimal. Selain itu, pembangunan sumber daya air juga ditujukan untuk dapat terus meningkatkan ketersediaan air baku untuk irigasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Rembang tetap terjaga perkembangannya di tahun-tahun mendatang.

1.5 Data Sumber Daya Manusia

Dukungan sumberdaya manusia pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	P3K	
1	SD	4	19	23
2	SMP Sederajat	4	10	4
3	SMA Sederajat	35	69	104
4	D3	4	3	7
5	D IV/S1	26	29	55
6	S2	9	1	10
7	S3	0	0	0
JUMLAH		82	121	203

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan paling banyak 51,23% pendidikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang adalah SMA sebanyak 104 Orang, dan lulusan S1 sebesar 27,09% sebanyak 55 Orang, dan paling sedikit lulusan SMP Sederajat sebesar 2% sebanyak 4 Orang.

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang berdasarkan golongan sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Golongan	Kategori	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	P3K	18	1	19
2	Golongan II	PNS	24	1	25
3	Golongan III	PNS	36	14	50
4	Golongan IV	PNS	8	0	8
5	Golongan V	P3K	65	4	69
6	Golongan VII	P3K	1	2	3
7	Golongan IX	P3K	21	8	29
Jumlah			173	30	203

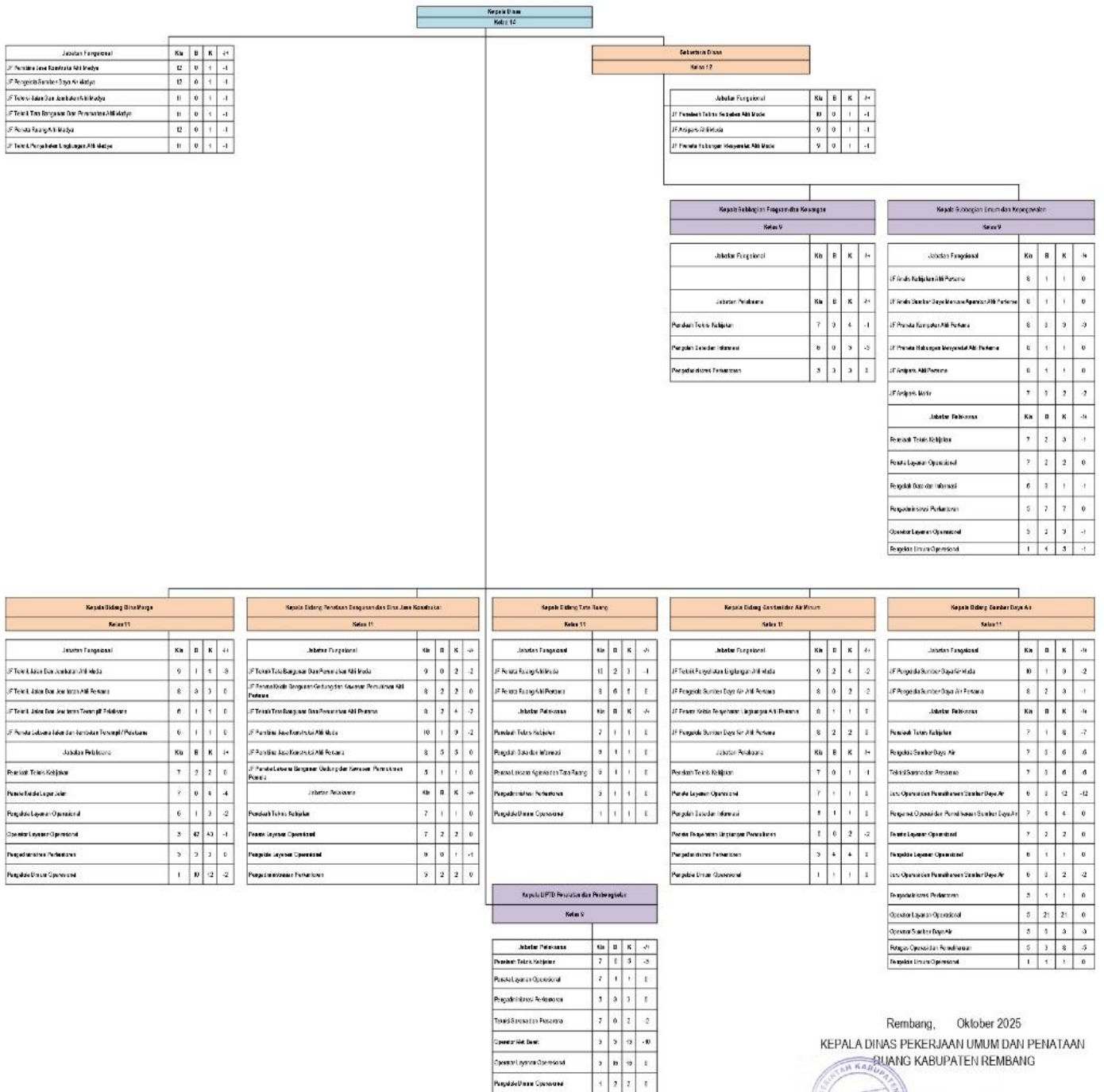
Tabel 1.3
Komposisi ASN DPUTARU Kabupaten Rembang
Berdasarkan Kelas Jabatan Tahun 2025

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai
A	Jabatan Struktural		
1	Eselon II	14	1
2	Eselon IIIa	12	1
3	Eselon IIIb	11	6
4	Eselon IVa	9	2
5	Eselon IVb	8	1
	Jumlah		11
B	Jabatan Fungsional Umum		
1	Analisis Bangunan dan Perumahan	7	1
2	Analisis Jalan dan Jembatan	7	1
3	Analisis Kelembagaan	7	2
4	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	1
5	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	1
6	Analisis Perumahan	7	1
7	Analisis Potensi Sumber Air Tanah	7	1
8	Analisis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	7	1
9	Analisis Tata Ruang	7	1
10	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	7	1
11	Penata Keuangan	7	1
12	Pengawas Pengairan	7	1
13	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	7	1
14	Pengawas Tata Bangunan	7	1
15	Pengelola Bangunan Gedung	7	1
16	Penata Layanan Operasional	7	5
17	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1
18	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	1
19	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	6	1
20	Pengelola Bengkel	6	1
21	Pengelola Gaji	6	1
22	Pengelola Kelengkapan Jalan	6	1
23	Pengelola Kepegawaian	6	1
24	Pengelola Keuangan	6	2
25	Pengelola Layanan Operasional	6	1
26	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	1

27	Pengelola Peralatan	6	1
28	Pengelola Sistem Manajemen Jalan	6	1
29	Pengelola Sumber Daya Air	6	1
30	Pengelola Umum Operasional	6	19
31	Operator Alat Berat	5	10
32	Operator Layanan Operasional	5	55
33	Pemelihara Jalan	5	8
34	Pengadministrasi Perkantoran	5	13
35	Pengadministrasi Umum	5	3
36	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	4
37	Pengemudi	3	1
38	Penjaga Pintu Air	3	6
	Jumlah		154
C	Jabatan Fungsional Tertentu		
1	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	9	1
2	Penata Ruang Ahli Muda	9	2
3	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	1
4	Teknik Pengairan Ahli Muda	9	1
5	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	9	2
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	8	1
8	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1
9	Arsiparis Ahli Pertama	8	1
10	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	5
11	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	3
12	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Ahli Pertama	8	2
13	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8	4
14	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	1
15	Penata Ruang Ahli Pertama	8	6
16	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	3
17	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6	2
	Jumlah		38
	Jumlah Keseluruhan Pegawai		203

Gambar 1.3 Peta Jabatan Persediaan dan Kebutuhan Pegawai

PELAJARAN, PERSILAHAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG



Rembang, Oktober 2025
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG KABUPATEN REMBANG

 MARYOSA, A.T.D. M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196712111990031007

1.6 Data Sarana dan Prasarana /BMD

Berikut tabel penyajian data asset, inventaris barang dan sarana/prasarana yang menunjang di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Tabel 1.4

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi				Jumlah
			Baik	Rusak			
				Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	m2	7.907.203,07				7.907.203,07
2	Bangunan/Gedung	unit	12				12
3	Jalan Kabupaten	Km	252,4	171,38	73,55	96,87	594,20
4	Jembatan	Unit	125				126
5	Waduk	Unit	6	48	30	49	133
6	Bendung	Unit	19	56	50	60	185
7	Bangunan Penguat Tebing/ Pantai	Unit	82				82
8	A.C.	unit	14		8	1	23
9	Printer	unit	21	20	1		42
10	Laptop	unit	43			14	57
11	Slide Projektor	unit	3				3
12	Buldozer	unit	1				1
13	Crawler Exchavator	unit	1				1
14	Dump Truck	unit	3				3
15	Macadam Roller/Three Wheel Roler	unit	10				10
16	Excavator PC 200	unit	1				1
17	Mesin Pemetong Rumput	unit	15				15
18	Pick Up	unit	3				3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi				Jumlah
			Baik	Rusak			
				Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Sepeda Motor Roda 3	unit	2				2
20	Vibrator Roller	unit	1				1
21	Truck + Attachment	unit	3				3
22	Track Loader	unit	2				2
23	Tandam Roller	unit	8				8
24	Mobil Station Wagon	unit	5				5
25	Road Maintenance Truck	unit	1				1
26	Sepeda Motor	unit	33				33
27	Stamper	unit	1				1

1.7 Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Pada bagian ini menjelaskan besaran anggaran DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB REMBANG tahun 2024 dan 2025.

Tabel 1.5
Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Anggaran Tahun 2024	Kode Rekening			Uraian	Sebelum (Rp.)	Setelah (Rp.)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.180.000.000	6.180.000.000
	4	1	2	Retribusi Daerah	6.080.000.000	6.080.000.000	0
	4	1	4	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000	100.000.000	0
	5	1		BELANJA OPERASI	24.358.739.000	28.296.660.474	3.937.921.474
	5	1	1	Belanja Pegawai	8.680.873.167	8.991.839.228	310.966.061
	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	8.222.709.833	11.650.065.246	3.427.355.413
	5	1	5	Belanja Hibah	7.455.156.000	7.654.756.000	199.600.000
	5	2		BELANJA MODAL	35.131.664.000	35.497.486.837	365.822.837
	5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.640.000	104.877.500	57.237.500
	5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.700.000.000	181.897.850	(1.518.102.150)

	5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.384.024.000	35.210.711.487	1.826.687.487
Jumlah Belanja					167.158.167.800	185.562.259.281	18.404.091.481
Anggaran Tahun 2025	Kode Rekening			Uraian	Sebelum (Rp.)	Setelah (Rp.)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
	4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.500.000.000,00	4.100.000.000,00	(400.000.000,00)
	4	1	2	Retribusi Daerah	4.400.000.000,00	4.000.000.000,00	(400.000.000,00)
	4	1	4	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	5	1		BELANJA OPERASI	26.306.381.692,00	33.655.242.348,50	7.348.860.656,50
	5	1	1	Belanja Pegawai	9.348.391.571,00	9.255.643.539,50	(92.748.031,50)
	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	9.113.646.121,00	18.870.254.809,00	9.756.608.688,00
	5	1	5	Belanja Hibah	7.844.344.000,00	5.529.344.000,00	(2.315.000.000,00)
	5	2		BELANJA MODAL	123.940.931.000,00	39.676.128.780,00	(84.264.802.220,00)
	5	2	1	Belanja Modal Tanah	12.600.000.000,00	12.600.000.000,00	0,00
	5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	193.415.000,00	193.415.000,00
	5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.150.000.000,00	1.548.000.000,00	(3.602.000.000,00)
	5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.190.931.000,00	25.334.713.780,00	(80.856.217.220,00)
	Jumlah Belanja					150.247.312.692,00	73.331.371.128,50

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPUTARU Kab Rembang

Tabel 1.6
Sumber Dana Anggaran Tahun 2025

Sumber Dana	Anggaran (Rp.)	
	Induk	Perubahan
Jumlah Anggaran	150.247.312.692,00	73.331.371.128,50
Anggaran dari Pemerintah Kabupaten	109.808.410.692,00	61.102.611.128,50
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	9.968.995.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	18.247.147.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.097.369.000,00	5.097.369.000,00
Insentif Fiskal	7.125.391.000,00	7.131.391.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPUTARU Kab Rembang

Terlihat pada Tabel 1.6 untuk Tahun Anggaran 2025 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang semula Rp. 150.247.312.692,00 setelah Anggaran Perubahan menjadi sebesar Rp 73.331.371.128,50. Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terlihat pada Tabel 1.6 berasal dari APBD Kabupaten dan Sumber Dana dari Pusat.

1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 1.7

REKAPITULASI TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INTERNAL SAKIP TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
1. Perencanaan Kinerja						
1	Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Belum tersedia	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang terkait Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan	Dokumen	Surat kepada Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1h7weRLvR1DPwepnegPHmMv4RGcSijeFD/view?usp=drive_link
2	a. Dokumen renstra tahun 2021-2026 (bab VII, Tabel 7.1 Program dan Pagu Indikatif) tidak menetapkan Program Penunjang, Kegiatan yang mendukung program penunjang, indikator dan target kinerja beserta pagu indikatif	Melakukan tindak lanjut pada Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dengan menetapkan indikator, target beserta pagu indikatif tahunan (tujuan, sasaran, program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan)	Dokumen	Rancangan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029	Tuntas	https://docs.google.com/document/d/1iIp8XCrb2dgVhe073Yf_jXosHNaYVW0/edit?usp=drive_link&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true
	b. Belum menyampaikan SKP pejabat struktural eselon III dan Kasub Bag Umpeg di Lingkungan DPUTARU Kab Rembang	Telah melengkapi SKP pejabat struktural di Lingkungan DPUTARU Kab Rembang	Dokumen	SKP Pejabat Struktural baik Eselon II, III, maupun IV.	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1QOdHOGR1CYIgeejGg2QR5W92wEAS09Zz?usp=drive_link
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Rembang telah menggunggah dokumen perencanaan, laporan kinerja tahun 2024 perjanjian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 serta dokumen	Mengunggah dokumen perencanaan, laporan kinerja Tahun 2024, perjanjian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta dokumen	Dokumen	Screenshot daftar informasi publik pada website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1s-VuElqsozt-KKZAqcLbMAKIubQYVX5K/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
	lainnya yang masuk dalam daftar informasi publik pada website resmi instansi namun masih dalam bentuk satu kesatuan dalam 1 (satu) link google drive	lainnya yang masuk dalam daftar informasi publik pada website resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
4	Masih terdapat indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan belum cukup memenuhi kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time -Bound)	Telah menyusun Profil Indikator Kinerja untuk memenuhi kriteria setiap level kinerja (Tujuan/sasaran/program/kegiatan) bahkan sampai dengan sub kegiatan secara detail melalui definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar memenuhi kriteria SMART (Spesific Masurable, Achievable, Relevan, Time Based).	Dokumen	Profil Indikator dengan kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time -Bound) dirumuskan dalam (Tujuan/sasaran/program/kegiatan dan sub kegiatan)	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1zkCRnJtDQI9WDcWoHFzGU_8gys-lx7BW/view?usp=drive_link
5	Terdapat Perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yaitu:					-
	Keputusan Kepala DPUTARU Kabupaten Rembang no 900/016/2022 tanggal 3 Januari 2022	Melaksanakan Keputusan Kepala DPUTARU Kabupaten Rembang Nomor 900/016/2022 tanggal 3	Dokumen	Surat Keputusan Kepala DPUTARU Kabupaten Rembang Nomor 900/016/2022 tanggal 3	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1kAdGmJg8Cm1lhzmTPrCHVV8bqtgAx95F/view?usp=s_haring

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
		Januari 2022 tanggal 3 Januari 2022 sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026		Januari 2022 sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026		
6	Masih terdapat ketidakselarasan cascading dengan dokumen renstra dan perjanjian kinerja (PK 2024 & PK 2025) Hal ini ditunjukkan bahwa dokumen rensta tahun 2021-2026 pada bab 4 tabel 4.1 menetapkan 5 (lima) sasaran namun dokumen cascading menetapkan 6 (enam) dengan sasaran ke 6 yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik indikator sasaran dengan indikator : Nilai SAKIP OPD	Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 700/031.b/INSP/2023 tanggal 4 September 2023 pada Perencanaan Kinerja poin c. DPUTARU Kabupaten Rembang telah menyusun Cascading Kinerja yang memuat tujuan, sasaran program, kegiatan hingga ke sub kegiatan beserta indikator-indikatornya namun belum mencantumkan program penunjang	Dokumen	Cascading DPUTARU dengan menambahkan program penunjang termasuk kegiatan dan sub kegiatannya beserta indikatornya	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1Lyt_bzht-40IblzIJulWn8NYPYCA3GsD/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
7	Dokumen pohon kinerja belum menggambarkan hubungan sebab-akibat atau jika-maka dari pencapaian kinerja serta belum menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Mengikuti Acara Workshop Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Renstra Perangkat Daerah untuk perbaikan yang akan datang.	Dokumen	Mengikuti Acara Workshop Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Renstra Perangkat Daerah.	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1NY50Ityb9PiJnjXiMCzBeMm4SADeGnx4/view?usp=drive_link
8	Terdapat rumusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) belum memenuhi syarat substansif kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kinerja individu belum mendukung perencanaan kinerja organisasi	Akan melakukan perbaikan rumusan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) agar memenuhi syarat substansif bahwa perencanaan kinerja individu mendukung perencanaan kinerja organisasi	Dokumen	SKP ASN (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) yang mendukung perencanaan kinerja organisasi	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1QOdHOgR1CYIgeejGq2QR5W92wEAS09Zz?usp=drive_link
9	Terdapat Indikator Kinerja utamanya indikator kinerja utama yang tidak tercapai hal ini ditunjukkan dalam Laporan Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2024 dari 5 (lima) IKU hanya 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dengan target tercapai sebagaimana rincian: a. Indeks Akseibilitas Infrastruktur (target:66,88, realisasi 36,75% capaian :	Telah melakukan analisis terhadap setiap indikator yang tidak tercapai identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan solusi yang dapat dilakukan pada LKJIP Hasil Review Inspektorat 2024.	Dokumen	Analisis terhadap setiap indikator yang tidak tercapai: identifikasi penyebab (internal/eksternal), hambatan, dan kendala teknis dan solusi yang dapat dilakukan	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1hT6FNR75IQchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
	<p>54,96%)</p> <p>b. Indeks akseibilitas jalan (target 76,13 realisasi 76,45% capaian 100,42%)</p> <p>c. Persentase Ketersediaan Air Baku (Target 55%, realisasi 40,43% capaian 73,51%)</p> <p>d. Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang (Target : 8, realisasi : 1% capaian 12,51%)</p> <p>e. prosentase pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi (target: 48,3% realisasi 31,95% capaian 66,16%)</p> <p>Demikian pula masih terdapat target Indikator Kinerja program, kegiatan & sub kegiatan yang belum tercapai</p>					
10	a.Masih terdapat ketidakselarasan indikator kinerja kegiatan dalam dokumen Renja Tahun 2024 dengan DPA Tahun 2024 (utamanya kegiatan yang menjadi kewenangan sekretariat)	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya DPA 2024 Pergeseran 8 telah melalui tahapan mekanisme alur perencanaan maupun penganggaran di Kabupaten Rembang	Dokumen	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya DPA 2024 Pergeseran 8 telah melalui tahapan mekanisme alur perencanaan maupun penganggaran di Kabupaten Rembang	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1yPwnjaltE01sPjhMMAmjZU_iYYWsp-6?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
	b. Terdapat ketidak selarasan pagu anggaran pada Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dengan DPA 2024 Pergeseran ke 8	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya DPA 2024 Pergeseran 8 telah melalui tahapan mekanisme perencanaan maupun penganggaran.	Dokumen	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya DPA 2024 Pergeseran 8 telah melalui tahapan mekanisme alur perencanaan maupun penganggaran.	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1yPwnjaltE01sPjhMMAmjZU_iYYWsp-6?usp=drive_link
11	Belum adanya perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, yang dibuktikan dengan adanya penurunan capaian kinerja berdasarkan dokumen LKJIP tahun 2024 dengan LKJIP Tahun 2023	Melakukan penyempurnaan indikator kinerja utama dan indikator kegiatan agar lebih terukur dan realistis pada Renstra yang akan datang.	Dokumen	Rancangan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029	Tuntas	https://docs.google.com/document/d/1iIp8XCrQb2dgVhe073Yf_jXosHNaYVW0/edit?usp=drive_link&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true
12	Belum seluruh pegawai paham, peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, hal ini dibuktikan dengan masih ada ketidakselarasan antara dokumen Perencanaan (Renstra, Renja & PK ASN) dengan SKP ASN (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu)	Melibatkan pegawai dalam proses perencanaan tahunan unit kerja agar memiliki rasa memiliki dan komitmen, mekanisme review dan validasi SKP oleh atasan langsung berdasarkan capaian unit kerja	Dokumen	Melibatkan pegawai dalam proses perencanaan tahunan unit kerja agar memiliki rasa memiliki dan komitmen, mekanisme review dan validasi SKP oleh atasan langsung berdasarkan capaian unit kerja	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1QOdHOgR1CYIgeejGq2QR5W92wEAS09Zz?usp=drive_link
II	Pengukuran Kinerja					

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Profil Indikator Kinerja hanya memuat IKU saja (IKM) belum dilengkapi dengan Program dan Kegiatan	Telah menyusun Profil Indikator Kinerja untuk memenuhi kriteria setiap level kinerja (Tujuan/sasaran/program/kegiatan) bahkan sampai dengan sub kegiatan secara detail melalui definisi operasional, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar memenuhi kriteria SMART (Spesific Masurable, Achievable, Relevan, Time Based).	Dokumen	Profil Indikator dengan kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time -Bound) dirumuskan dalam (Tujuan/sasaran/progrm/kegiatan dan sub kegiatan)	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1zkCRnJtDQI9WDcWoHFzGU_8gys-lx7BW/view?usp=drive_link
2	Dokumen Renja Tahun 2024 belum menetapkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai kinerja	Dokumen Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang memuat rencanarencana kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang pada tahun 2024, berisi rencana tahunan dimana penyusunannya mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan	Dokumen	Dokumen Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang memuat rencanarencana kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang pada tahun 2024, berisi	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/18gGWArm7s8pCzn7O-zO7TmrmEuafPizF/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
		Penataan Ruang Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.		rencana tahunan dimana penyusunannya mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.		
3	Data capaian kinerja yang dikumpulkan dan disajikan dalam dokumen laporan kinerja belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan karena belum diyakini keakuratannya, utamanya kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan karena belum menyajikan realisasi indikator kinerja dan tidak didukung dengan formulasi penghitungan kinerja	Telah menyusun dan menetapkan formulasi penghitungan capaian kinerja untuk setiap indikator pada level program, kegiatan, dan subkegiatan, Formulasi telah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing indikator (kuantitatif/kualitatif, input/output/outcome).	Dokumen	Profil Indikator dengan kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time -Bound) dirumuskan dalam (Tujuan/sasaran/program/kegiatan dan sub kegiatan)	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1zkCRnJtDQI9WDcWoHFzGU_8gys-lx7BW/view?usp=drive_link
III	Pelaporan Kinerja					
1	Dokumen Laporan Kinerja baru menginfokan penyandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten Blora belum dengan Kabupaten (Pati, Kudus & Jepara)/Provinsi nasional (Brenchmark Kinerja)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan penyandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten Blora	Dokumen	Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan penyandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten Blora	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1hT6FNR75IQchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/view?usp=drive_link

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
2	Laporan Kinerja belum menginformasikan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang didukung dengan formulasi penghitungan beserta analisis penjelasan	Laporan Kinerja telah menginformasikan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang didukung dengan formulasi penghitungan beserta analisis penjelasan	Dokumen	Laporan Kinerja telah menginformasikan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang didukung dengan formulasi penghitungan beserta analisis penjelasan	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1hT6FNR75IQchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/view?usp=drive_link
3	Dalam penyajian informasi pada Laporan Kinerja DPUTARU Kabupaten Rembang sebagai upaya pengendalian Internal menunjukkan belum adanya perhatian pimpinan dan seluruh pegawai dalam upaya pencapaian target dan peningkatan kinerja individu, unit kerja masing masing dan unit organisasi di lingkungan DPUTARU	Pimpinan DPUTARU berkomitmen kuat terhadap pencapaian kinerja melalui pengarahannya rutin, evaluasi kinerja berkala, dan keterlibatan kepala bidang dalam pencapaian target kinerja DPUTARU.	Dokumen	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPUTARU Kabupaten Rembang	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1hT6FNR75IQchCIHvoG2saqkjrloKDVfx/view?usp=drive_link
IV	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
1	DPUTARU Kabupaten Rembang telah melakukan penilaian mandiri atas implementasi SAKIP, namun Penilaian Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	DPUTARU terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat dan Bappeda terkait tata cara evaluasi internal dan penyesuaian indikator kinerja dengan dokumen perencanaan daerah.	Dokumen	DPUTARU terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat dan Bappeda terkait tata cara evaluasi internal dan penyesuaian indikator kinerja dengan dokumen perencanaan daerah.	Tuntas	https://docs.google.com/document/d/1iIp8XCrQb2dgVhe073Yf_jXosHNaYWV0/edit?usp=drive_link&oid=117536727477643562422&rtpof=true&sd=true

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
2	Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPUTARU Kabupaten Rembang belum membuat inovasi inovasi untuk mendukung percepatan peningkatan kinerjanya	DPUTARU menyadari pentingnya inovasi sebagai bagian dari peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan berkomitmen untuk mulai merancang serta menerapkan sejumlah inovasi di bidang infrastruktur, tata ruang, dan layanan teknis.		DPUTARU Kabupaten Rembang menyambut baik rekomendasi ini dan berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya inovasi yang aplikatif, berdampak langsung, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan, tata kelola infrastruktur, dan pemanfaatan ruang yang lebih baik.	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/13t844UKXickDrpZ0wBD/NXsqYUFLsqVH_/view?usp=drive_link

1.9 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun berdasarkan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil (result oriented) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan kinerja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan strategis, perencanaan tahunan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur		Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Na	58,05	61.61	66.88	70.44	
1.3.1		1.3.2.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	Na	0.46	0.48	0.50	0.52
1.3.1		1.3.2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Na	69.87	72.93	76.13	79.2
1.3.1		1.3.2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	Na	40	45	55	60
1.3.1		1.3.2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Na	4	6	8	9

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.1		1.3 2.5 Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Na	46.6	47	48.3	50

Sumber: Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	1.3.1.1# 0.1 Indeks Aksesibilitas Jalan	nilai	Jalan Dalam Kondisi Mantap	(panjang jalan kondisi mantap)/(Luas Wilayah Administrasi)	Bidang Bina Marga DPU TARU
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	1.3.1.2# 0.1 Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	nilai	Persentase (%) Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sanitasi Layak, persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	(Capaian Air Minum+Air Limbah Domestik+drainase+persampahan)/3	Bidang Sanitasi dan Air Minum DPU TARU
1.3.1.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	1.3.1.3# 0.1 Persentase Keterediaan Air Baku	persentase	Persentase Ketersediaan Air Baku	(jumlah ketersediaan air baku)/(kebutuhan air baku) x 100%	Bidang Sumber Daya Air DPU TARU

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	1.3.1.4# 0.1	Capaian perwujudan Program Rencana Tata Ruang prosentase	Capaian perwujudan program rencana tata ruang	(jumlah dokumen RTR yang ditetapkan)/(jumlah dokumen RTR yang direncanakan) x 100%	Bidang Tata Ruang DPUTA RU
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	1.3.1.5# 0.1	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi prosentase	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi	(Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun (n)-bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksis tahun (n-1))/(Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun n-1) x 100%	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi DPUTA RU

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang disusun sebagai langkah sistematis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya organisasi, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman operasional yang menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan.

Pada Misi ketiga yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dengan indikator tujuan yaitu: 1) indeks infrastruktur; 2) pertumbuhan ekonomi; 3) angka kemiskinan; 4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran yang akan dicapai salah satunya yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur. Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
- 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa air minum, sanitasi dan jaringan utilitas;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku serta peningkatan pengendalian banjir;
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 5) Peningkatan kualitas jasa konstruksi, bangunan gedung dan lingkungannya serta mendorong penerapan standar gedung hijau dan laik fungsi pada bangunan;

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dalam rangka Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi. Arah kebijakan ini menjadi dasar dalam penentuan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang. Perumusan strategis memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan strategis diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

Visi	Rembang Gemilang 2026
------	-----------------------

Misi 3	Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan;	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi
	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa air minum, sanitasi dan jaringan utilitas	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku serta peningkatan pengendalian banjir;	
	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	Peningkatan kualitas jasa konstruksi, bangunan gedung dan lingkungannya serta mendorong penerapan standar gedung hijau dan laik fungsi pada bangunan	

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang 2021-2026

2.3. Struktur Anggaran (Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025)

Struktur anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan capaian sasaran kinerja, program, kegiatan, dan sub kegiatan dirancang untuk secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

Berikut rincian pagu anggaran per sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025.

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	1	2	3	4
1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	103.302.631.000	27.495.353.380	(75.807.277.620)
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	103.302.631.000	27.495.353.380	(75.807.277.620)
	Pembangunan Jalan	51.580.631.000	12.004.000.000	(39.576.631.000)
	Pemeliharaan Berkala Jalan	18.375.000.000	0	(18.375.000.000)
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	23.214.000.000	0	(23.214.000.000)
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.000.000	500.000.000	0
	Rehabilitasi Jalan	5.133.000.000	475.000.000	(4.658.000.000)
	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.500.000.000	14.516.353.380	10.016.353.380
2. Meningkatkan Akses Layanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0	100.000.000	100.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0	100.000.000	100.000.000
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	0	100.000.000	100.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.122.369.000	5.122.369.000	0
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.122.369.000	5.122.369.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.122.369.000	5.122.369.000	0
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	825.000.000	1.675.000.000	850.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	825.000.000	1.675.000.000	850.000.000
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	525.000.000	1.375.000.000	850.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	300.000.000	300.000.000	0
3. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21.875.000.000	25.391.170.780	3.516.170.780
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.875.000.000	23.752.223.100	4.877.223.100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	0	16.000.000	16.000.000
	Pembangunan Tanggul Sungai	5.875.000.000	3.650.504.100	(2.224.495.900)
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	200.000.000	5.719.000	(194.281.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/
	Sub Kegiatan			Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		100.000.000	100.000.000
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	12.600.000.000	19.350.000.000	6.750.000.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	200.000.000	530.000.000	330.000.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		100.000.000	100.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000	1.638.947.680	(1.361.052.320)
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.600.000.000	1.238.947.680	(1.361.052.320)
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	350.000.000	350.000.000	0
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	50.000.000	50.000.000	0
4. Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	75.000.000	215.232.345	140.232.345

Sasaran	Program/Kegiatan/	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/
	Sub Kegiatan			Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota)	25.000.000	99.835.230	74.835.230
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	25.000.000	99.835.230	74.835.230
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	66.115.000	41.115.000
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	25.000.000	66.115.000	41.115.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	49.282.115	24.282.115
	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	25.000.000	49.282.115	24.282.115
5. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.238.000.000	2.166.865.050	(1.071.134.950)
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.238.000.000	2.166.865.050	(1.071.134.950)
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	3.000.000.000	685.000.000	(2.315.000.000)
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	1.400.000.000	1.250.000.000

Sasaran	Program/Kegiatan/	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	88.000.000	81.865.050	(6.134.950)
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.000.000.000	148.000.000	(4.852.000.000)
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000	148.000.000	(4.852.000.000)
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5.000.000.000	148.000.000	(4.852.000.000)
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	12.000.000	7.881.150	(4.118.850)
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	12.000.000	7.881.150	(4.118.850)
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruks	12.000.000	7.881.150	(4.118.850)

Sasaran	Program/Kegiatan/	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5
6. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.797.312.692	11.009.499.424	212.186.732
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	35.678.710	27.678.710
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.690.000	690.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	3.323.000	1.323.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	23.875.210	21.875.210
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	5.790.500	3.790.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.702.391.571	9.500.123.540	(202.268.032)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.348.391.571	9.255.643.539,50	(92.748.032)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	354.000.000	244.480.000	(109.520.000)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.600.000	21.600.000	0
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	21.600.000	21.600.000	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.945.580	149.945.970	(34.999.610)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.947.600	9.947.600	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000	11.000.000	0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	0	

Sasaran	Program/Kegiatan/	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp.)
	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.065.980	27.101.580	(12.964.400)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	0
	Penyediaan Bahan/Material	32.000.000	28.694.790	(3.305.210)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.932.000	56.202.000	(18.730.000)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	1.600.000	1.600.000
	Pengadaan Mebel		1.600.000	1.600.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.421.121	1.067.840.796	402.419.675
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.999.996	174.999.996	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.421.125	885.840.800	402.419.675
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.954.420	232.710.408	17.755.988
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.584.420	107.050.408	14.465.988
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Alat Besar	98.000.000	98.000.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.970.000	9.260.000	3.290.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.400.000	18.400.000	0

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Akseibilitas Jalan	0.52
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	79,20
1.3.1.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	60
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	9
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	50

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:

Tabel 2.6
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Penataan Bangunan Gedung	%	35
2	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	% Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	%	35
3	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	1
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kesesuaian Penataan Bangunan Gedung	%	100
5	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung	%	
6	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	10
7	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
8	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	50
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak	%	98%
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak	%	98%
11	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	425
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang drainase dalam kondisi mantap	%	35
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	%	35
14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter	2400
15	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	500
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	%	100
17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak	%	100
18	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Desa	287

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		Penyediaan Air Minum (SPAM)		
19	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Terbangunnya Sarana Prasarana Persampahan Sesuai Standar	%	40
20	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota			
21	Optimalisasi Tpa/Tpst/Spa/Tps- 3r/Tps	Jumlah Tpa/Tpst/Spa/Tps- 3r/Tps Yang Dioptimalisasi	Unit	
22	Penyediaan Sarana Pendukung Tpa/Tpst/Spa/Tps- 3r/Tps	Jumlah Sarana Pendukung Tpa/Tpst/Spa/Tps-3r/Tps Yang Disediakan	Unit	
23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	60
24	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	60
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	
26	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1
27	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	
28	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	1,5
29	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	2

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
30	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	
31	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	
32	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	60
33	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	0,4
34	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	DI	20
35	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	2
36	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pertumbuhan ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi	angka	10
37	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pelatihan dan/atau sertifikasi	0	10
38	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	0	1
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai IKM	Angka Angka	72,72 83,69
40	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
41	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12
42	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	100
43	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
44	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	107
45	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	%	100
46	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24
47	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
48	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1
49	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
50	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
51	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
52	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
53	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36
54	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	%	100%
55	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
56	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3
57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11
58	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	27
59	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	100%
60	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20
61	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	31
62	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%
63	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
64	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
65	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12
66	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
67	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100
68	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2
69	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
70	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1
71	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
72	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap	%	71,3
73	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	71,3
74	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	30
75	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM	70
76	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	2
77	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	20
78	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	10
79	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	30
80	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	70
81	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR	%	100
82	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang	%	100
83	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	1
84	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang	%	100
85	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	2

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
86	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan RTR	Dokumen	2
87	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tahun 2025

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, diperlukan berbagai instrumen pendukung yang berfungsi sebagai alat bantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Instrumen pendukung tersebut antara lain dokumen perencanaan kinerja, sistem informasi manajemen, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang antara lain :

1. Dokumen Perencanaan

Sebagai dasar penetapan target kinerja :

- RPJMD Kabupaten Rembang 2021–2026
- RKPD Kabupaten Rembang
- Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas
- RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)

2. Dokumen Penganggaran

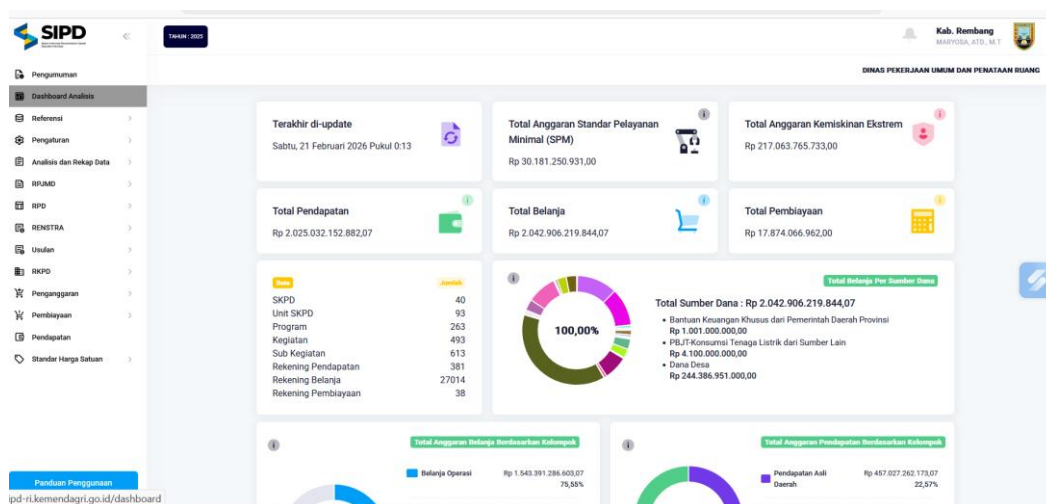
Menunjukkan adanya dukungan anggaran terhadap target capaian kinerja.

- DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
- DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)
- Dokumen realisasi keuangan

3. Data Teknis Infrastruktur (data kondisi jalan, data jaringan irigasi, data drainase, RDTR, dsb).
4. Aplikasi Pendukung :
 - a. SIPD

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terintegrasi, termasuk dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Gambar 2.1 Aplikasi SIPD



- b. Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aplikasi website merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi, mengelola data, serta menendukung proses kerja agar lebih efektif dan efisien. Dengan tampilan yang interaktif dan kemudahan akses kapan saja dan di mana saja, aplikasi website berfungsi sebagai sarana pendukung pengambilan keputusan kualitas layanan, serta optimalisasi kinerja organisasi atau instansi.

Gambar 2.2 Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



c. SRIKANDI

SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri PANRB No. 679 Tahun 2020. Aplikasi ini wajib digunakan instansi pusat dan daerah untuk pengelolaan surat-menyurat dan arsip berbasis elektronik (SPBE) agar lebih cepat, aman, efisien, dan terintegrasi.

Gambar 2.3 Aplikasi SRIKANDI

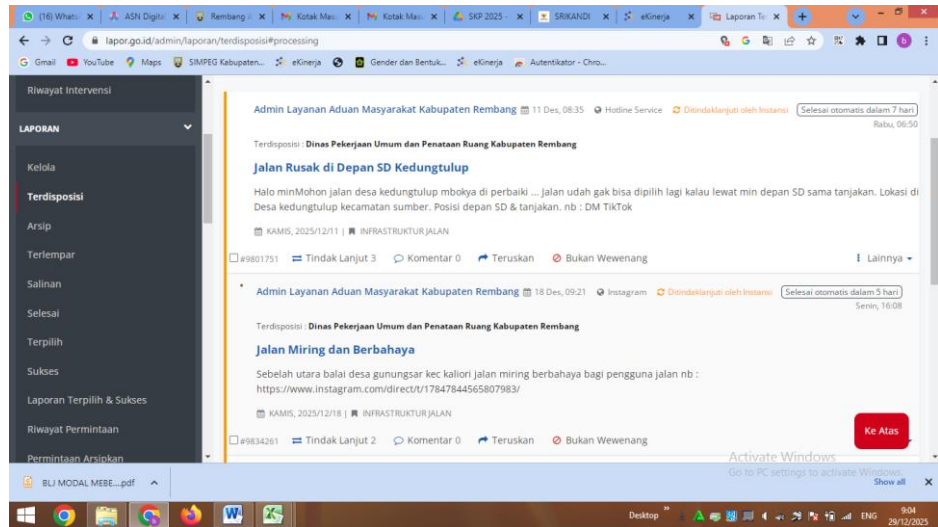


d. LAPOR

Aplikasi lapor.go.id (SP4N-LAPOR!) adalah layanan digital resmi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara

terintegrasi, mudah, dan transparan. Dikelola oleh KemenPANRB, KSP, dan Ombudsman, aplikasi ini memungkinkan warga melapor via website, SMS, atau aplikasi mobile, memastikan laporan ditindaklanjuti secara cepat.

Gambar 2.4 Aplikasi LAPOR



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

3.1.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara pimpinan perangkat daerah dengan kepala daerah pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja tersebut

memuat sasaran strategis beserta indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian dilakukan dengan memuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang bersifat positif yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditentukan dan ditetapkan dari sasaran strategis yang akan dicapai.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,52	0,41	78,85	Tinggi	BIDANG BINA MARGA
Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	79,2	74,84	94,49	Sangat Tinggi	BIDANG SANITASI DAN AIR MINUM
Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	60	46,01	76,68	Tinggi	BIDANG SDA
Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	9	4	44,44	Sangat Rendah	BIDANG TATA RUANG
Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	50	33,33	66,66	Sedang	BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

Dari hasil pengukuran kinerja di atas bahwa pada Tahun 2025 dengan formulasi perhitungan masing masing indikator sebagai berikut :

- a. Indeks Aksesibilitas Jalan, Panjang Jalan Kondisi Mantap/Luas Wilayah Administrasi $(252,40+171,38)/1.014,10$ capaian kinerja sebesar 0,41% kategori Tinggi.
- b. Indeks Akses Layanan Dasar dengan formulasi perhitungan (capaian air minum+capaian air limbah domestik+persampahan/3

$(92,94+93,01+38,58/3)$ memiliki capaian 74,84% kategori Sangat Tinggi.

- c. Persentase ketersediaan air baku dengan formulasi perhitungan jumlah ketersediaan air baku/kebutuhan air baku x 100% $(363.568.936,03/790.172.565,91$ dikalikan 100%) memiliki capaian 46,01% kategori Tinggi.
- d. Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi dengan formulasi perhitungan (Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2024 – Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2023 dibagi Bantuan Teknis Bantuan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2023 dikali 100%) memiliki capaian $(200-150)/150 \times 100\%$) capaian 33,33% dalam kategori Sedang.
- e. Sedangkan Prosentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang dengan perhitungan jumlah penetapan RDTR di Kabupaten Rembang tercapai 4 yaitu RTRW, RDTR Rembang, RTRWRDTR Lasem, RDTR Kragan atau 44,44% kategori Sangat Rendah, hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa melaksanakan program secara optimal.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya berdasarkan periode Renstra diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realiasi	Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Akseibilitas Jalan	Na	0,41	0,41	0,41	0,52	0,41	78,85

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realiasi	Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	Na	65,27	73,44	76,45	79,2	74,84	94,49
1.3.1.3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	35%	29,90	30,70	40,43	60	46,01	76,68
1.3.1.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	Na	3	2,00	1,00	9	4	44,44
1.3.1.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	Na	47,30	47,78	31,95	50	33,33	66,66

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari misi Pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 yaitu Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan dengan Indikator Kinerja Indeks Aksesibilitas Jalan realisasi Tahun 2023, 2024,2025 yaitu sebesar 0,41.
- Sasaran 2. Meningkatnya Akses Layanan Dasar dengan Indikator Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar Tahun 2025 sebesar 74,84 mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebesar 73,44.
- Sasaran 3. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Indikator Persentase Ketersediaan Air Baku Tahun 2025 sebesar 46,01 % mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 35%, Tahun 2022 sebesar 29,90, Tahun 2023 sebesar 30,70%, Tahun 2024 sebesar 40,43%.
- Sasaran 4. Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah dengan Indikator Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang Tahun 2024 dan

Tahun 2025 tercapai 4 dokumen mengalami kenaikan dari Tahun 2022 tercapai 3 dokumen.

- Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi dengan Indikator % Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Tahun 2025 sebesar 33,33%, mengalami kenaikan dari Tahun 2024 realisasi sebesar 31,95%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Organisasi (berdasarkan dokumen Renstra)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Target Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	0,41	0.52	78,85
3	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	74,84	79,20	94,49
4	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	46,01	60	76,68
5	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	4	9	44,44
6	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa kontruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	33,33	50	66,66

Sumber : IKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

Dari Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Sasaran 1 *Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan*

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi Indeks Aksesibilitas Jalan tahun ini: 0,41
- Target jangka menengah: 0,50
- Capaian kinerja mencapai 78,85 %

menunjukkan bahwa peningkatan pemerataan dan kualitas Pembangunan jalan dan jembatan sudah berjalan cukup baik meskipun belum mencapai target. Artinya, pemerataan pembangunan jalan dan jembatan belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan anggaran, kondisi kerusakan jalan, serta prioritas penanganan pada ruas tertentu.

➤ Sasaran 2 *Meningkatnya Akses Layanan Dasar*

Perbandingan Kinerja:

Realisasi Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar tahun ini: 74,84

Target jangka menengah: 79,20

Capaian kinerja mencapai 94,49

menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan dasar sudah berjalan baik dan mendekati target, kinerja yang dicapai sudah cukup optimal upaya peningkatan infrastruktur pendukung layanan dasar, seperti air minum layak, sanitasi layak drainase, air bersih, dan fasilitas persampahan telah memberikan dampak positif terhadap kemudahan akses masyarakat.

➤ Sasaran 3: *Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air*

Perbandingan Kinerja:

Realisasi Persentase Ketersediaan Air Baku tahun ini: 46,01%

Target jangka menengah: 60%

Capaian kinerja mencapai 76,68%

menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketersediaan air baku sudah berjalan, namun masih belum optimal, masih diperlukan peningkatan kapasitas infrastruktur sumber daya air. Beberapa faktor yang

mempengaruhi antara lain keterbatasan sarana prasarana, kondisi jaringan yang belum sepenuhnya optimal, serta faktor cuaca.

➤ *Sasaran 4 Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah*

Perbandingan Kinerja:

Realisasi capaian dokumen rencana tata ruang tahun ini: 4 dokumen

Target jangka menengah: 9 dokumen

Capaian kinerja mencapai 44,44%

menunjukkan bahwa pelaksanaan penyusunan dokumen tata ruang masih belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain proses regulasi yang cukup panjang, kebutuhan sinkronisasi dengan kebijakan pusat dan provinsi, serta keterbatasan anggaran penyusunan dokumen.

➤ *Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi*

Perbandingan Kinerja:

Realisasi pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi hingga ini: 33,33%

Target jangka menengah: 50%

Capaian kinerja mencapai 66,66%

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan layanan jasa konstruksi sudah berjalan, namun belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan permohonan bantuan teknis, kapasitas SDM teknis, serta proses administrasi dan pendampingan yang membutuhkan waktu.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional/provinsi/kabupaten (jika ada)

Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional, provinsi, atau kabupaten untuk menilai sejauh mana capaian suatu indikator sudah memenuhi atau mendekati target yang ditetapkan di tingkat yang lebih luas. Perbandingan ini berguna untuk mengetahui apakah kinerja suatu daerah lebih baik, setara, atau masih di bawah standar nasional atau provinsi, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan, efektivitas program pembangunan, dan kebutuhan intervensi kebijakan. Dengan demikian,

evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan program, perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, dan monitoring pencapaian indikator pembangunan secara menyeluruh.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase jalan mantap.

Persentase jalan mantap adalah ukuran yang menunjukkan berapa persen panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (layak digunakan) dibandingkan dengan total panjang jalan yang ada di suatu wilayah. Kondisi mantap adalah gabungan antara jalan kondisi baik ditambah jalan kondisi sedang. Kondisi tidak mantap adalah jalan kondisi rusak ringan dan jalan kondisi rusak berat.

Tabel 3.5
Persentase Jalan Mantap

Indikator	Formulasi	Realisasi Kab. Rembang Tahun 2025	Realisasi Kab. Blora Tahun 2025	Realisasi Kab. Pati Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Persentase jalan mantap	Panjang jalan kondisi baik+sedang/Panjang jalan kabupaten	71,17	69,51	75,25	94,01	95,22

Berdasarkan realisasi Persentase Jalan Mantap Tahun 2025, terlihat bahwa capaian tertinggi berada pada tingkat nasional sebesar 95,22% dan tingkat provinsi sebesar 94,01%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jalan pada kewenangan pusat dan provinsi telah berada dalam kondisi baik dan sedang (mantap). Sementara itu, pada tingkat kabupaten, capaian masih berada di bawahnya, dengan Kabupaten Pati mencapai 75,25%, Kabupaten Rembang 71,17%, dan Kabupaten Blora 69,51%. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan capaian antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan nasional, sehingga upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan di tingkat kabupaten masih perlu terus dioptimalkan agar mendekati standar kemantapan jalan di tingkat yang lebih tinggi.

2. Persentase Daerah Irigasi terlayani Jaringan Irigasi.

Persentase Daerah Irigasi (DI) terlayani Jaringan Irigasi adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar luas daerah irigasi yang telah mendapatkan layanan air melalui jaringan irigasi yang berfungsi dibandingkan dengan total luas daerah irigasi yang ada.

Tabel 3.6
Persentase Daerah Irigasi terlayani Jaringan Irigasi

Indikator	Formulasi	Realisasi Kab. Rembang Tahun 2025	Realisasi Kab. Blora Tahun 2025	Realisasi Kab. Pati Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Persentase Daerah Irigasi terlayani Jaringan Irigasi.	Luas daerah irigasi terlayani jaringan irigasi/luas daerah irigasi X100%	59,92	54,68	Na	Na	Na

Berdasarkan data Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi Tahun 2025, Kabupaten Rembang mencapai 59,92 % dan Kabupaten Blora 54,68 %, menunjukkan bahwa sebagian besar daerah irigasi di kedua kabupaten tersebut sudah terlayani jaringan irigasi, meskipun masih terdapat sekitar 40–45 % lahan yang belum mendapatkan layanan penuh. Sementara itu, data untuk Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat nasional belum tersedia, sehingga belum memungkinkan untuk perbandingan atau evaluasi capaian di wilayah yang lebih luas. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan jaringan irigasi di tingkat kabupaten masih perlu ditingkatkan melalui rehabilitasi, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur agar seluruh lahan pertanian dapat terlayani secara optimal.

3. Persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman.

Indikator persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman yaitu indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang memenuhi standar kesehatan, aman dari kontaminasi, dan layak untuk dikonsumsi.

Tabel 3.7
Persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman

Indikator	Formulasi	Realisasi Kab. Rembang Tahun 2025	Realisasi Kab. Blora Tahun 2025	Realisasi Kab. Pati Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Persentase rumah tangga mengakses air minum yang layak dan aman.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum/jumlah rumah tangga seluruh kabupaten X100%	92,94	95,63	Na	95,73	92,64

Berdasarkan realisasi Tahun 2025, persentase rumah tangga yang mengakses air minum yang layak dan aman menunjukkan bahwa Kabupaten Blora mencapai 95,63% dan Kabupaten Rembang 92,94%, sedangkan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan berada di angka 95,73% dan nasional 92,64%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di kedua kabupaten dan provinsi telah memiliki akses air minum yang layak dan aman, bahkan berada di atas rata-rata nasional. Sementara itu, data untuk Kabupaten Pati belum tersedia, sehingga belum dapat dibandingkan. Secara umum, capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan nasional dalam meningkatkan akses air minum yang aman bagi masyarakat.

4. Persentase rumah tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman

Indikator yang menunjukkan proporsi rumah tangga yang memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan (layak) serta dikelola secara aman, dibandingkan dengan total seluruh rumah tangga di suatu wilayah.

- Sanitasi layak umumnya mencakup fasilitas seperti jamban leher angsa dengan tangki septik, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), atau sistem pembuangan yang tidak mencemari lingkungan.
- Sanitasi aman berarti limbah tinja dikelola dengan benar, tidak mencemari tanah, air, atau lingkungan sekitar (sesuai konsep Safely Managed Sanitation dalam SDGs).

Tabel 3.8
Persentase rumah tangga mengakses sanitasi yang layak dan aman

Indikator	Formulasi	Realisasi Kab. Rembang Tahun 2025	Realisasi Kab. Blora Tahun 2025	Realisasi Kab. Pati Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi/jumlah rumah tangga seluruh kabupaten X100%	93,01	95,63	Na	Na	72,31

Berdasarkan data realisasi tahun 2025, Persentase Rumah Tangga Mengakses Sanitasi Layak dan Aman menunjukkan bahwa Kabupaten Blora mencapai 95,63% dan Kabupaten Rembang 93,01%, yang berarti sebagian besar rumah tangga di kedua kabupaten tersebut telah memiliki akses sanitasi layak dan aman, bahkan berada jauh di atas capaian nasional sebesar 72,31%. Hal ini menggambarkan kondisi sanitasi di tingkat kabupaten (khususnya Blora dan Rembang) sudah sangat baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, data untuk Kabupaten Pati dan tingkat Provinsi belum tersedia (Na), sehingga belum dapat dilakukan perbandingan secara menyeluruh di tingkat regional.

5. Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang Indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi lahan atau wilayah yang pemanfaatannya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dibandingkan dengan total wilayah yang diatur oleh RTRW. Indikator ini untuk menilai efektivitas perencanaan tata ruang dan kepatuhan terhadap regulasi zonasi.

Tabel 3.9
Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

Indikator	Formulasi	Realisasi Kab. Rembang Tahun 2025	Realisasi Kab. Blora Tahun 2025	Realisasi Kab. Pati Tahun 2025	Realisasi Provinsi Tahun 2025	Realisasi Nasional Tahun 2025
Persentase Kesesuaian	Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai	95	100	98,87	Na	Na

pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	rencana tata ruang/jumlah pemanfaatan ruang X100%					
---	---	--	--	--	--	--

Berdasarkan data realisasi tahun 2025, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang menunjukkan bahwa Kabupaten Blora mencapai 100%, Kabupaten Pati 98,87%, dan Kabupaten Rembang 95%, yang berarti hampir seluruh pemanfaatan ruang di ketiga kabupaten ini telah sesuai dengan ketentuan RTRW, menunjukkan implementasi tata ruang yang sangat baik di tingkat kabupaten. Sementara itu, data untuk Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional belum tersedia (Na), sehingga belum bisa dilakukan perbandingan di tingkat yang lebih luas.

3.1.5 Membandingkan Realisasi dan Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.

Membandingkan realisasi dan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 berarti menilai sejauh mana pelaksanaan program atau kegiatan di lapangan telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan, mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan capaian, serta menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan agar strategi dan alokasi sumber daya dapat disesuaikan.

Tabel 3.10
Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun 2025

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD DPU	Nilai SAKIP Unit Kerja sesuai hasil evaluasi dari Inspektorat	70,56	64,95	92,04
	Nilai IKM OPD DPU	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang/Total Unsur yang Terisi x100	88,7	88,18	99,41
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu/Target jumlah dokumen perencanaan yang harusnya tersedia x100	100	50	50

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1	50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana/Target jumlah layanan administrasi keuangan x100	100	50	50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107	104	97,2
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	5	20
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah tersedia tepat waktu dibandingkan target Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah harusnya tersedia x100	100	75	75
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12	2	16,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terlaksana/Target jumlah layanan administrasi kepegawaian x100	100	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan umum	Jumlah layanan administrasi umum kantor yang terlaksana/Target jumlah layanan administrasi umum kantor x100	100	25	25

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10	9	90
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	1	50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	18	40
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan administrasi kantor yang terlaksana/Target jumlah layanan administrasi kantor x100	100	25	25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	3	60
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	25
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4	33,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondisi Baik	Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana/Target jumlah layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah x 100	100	75	75

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	27	14	51,8
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	24	66,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	Persentase capaian kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ditambah dengan capaian kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota/2	60	59,92	99,86
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi infrastruktur Pengendalian Banjir dibagi dengan Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir	60	61,23	102,05
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1,5	1,58	105,3
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar dan pengaman pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2	2	100
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1	1	100,48
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	2	2	100

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1	1	100
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang Jaringan irigasi kondisi baik ditambah dengan bangunan irigasi kondisi baik dibagi dengan panjang total jaringan irigasi.	60	56,68	94,46667
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2	2,45	122,5
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,4	0,48	120
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	20	20	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak/Jumlah seluruh Rumah Tangga Kabupaten/Kota x 100	100	92,94	92,94
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak	Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak/Jumlah seluruh Rumah Tangga Kabupaten/Kota x 100	100	92,94	92,94
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	287	287	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak	jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sistem Air Limbah/Jumlah Seluruh Rumah Tangga Kabupaten/Kota x 100	98	93,01	94,9
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses sistem limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses sistem limbah domestik	98	93,01	94,9
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	425	425	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	Panjang Drainase dalam kondisi mantap/Total Panjang Drainase x 100	35	35	100

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase dalam kondisi mantap	Panjang Drainase dalam kondisi mantap/Total Panjang Drainase x 100	35	35	100
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500	500	100
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	2.400	2400	100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	% Jumlah Bantuan Teknis Bangunan Gedung	bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksitahun (n)-bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksi tahun (n-1)/bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksi tahun n-1 x 100	100	96,15	96,15
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Jumlah Penerbitan IMB/PBG dan SLF Sesuai Pengajuan Pemohon di SIMBG	Jumlah bangunan layak fungsi/jumlah total pengajuan x 100	100	96,15	96,15
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	10	10	100
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10	10	100
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),	50	50	100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	% Jumlah Bantuan Teknis Penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Jumlah Bantuan Teknis Yang Diberikan/Jumlah Bantuan Teknis yang Direncanakan x 100	35	33,49	95,68

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Yang Diberikan/Jumlah Bantuan Teknis yang Direncanakan x 100	Jumlah Bantuan Teknis Yang Diberikan/Jumlah Bantuan Teknis yang Direncanakan x 100	35	33,49	95,68
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	% Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Jumlah Bantuan Teknis Yang Diberikan/Jumlah Bantuan Teknis yang Direncanakan x 100	1	2	200
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan mantap (baik dan sedang) /Total Panjang jalan x100	83	71,17	85,74
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan mantap (baik dan sedang) /Total Panjang jalan x100	83	71,17	85,74
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	70	10,993	15,7
Survey Kondisi Jalan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	70	845,096	1.207,28
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	30	0,61	2,03
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10	76	760
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pertumbuhan ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi	Ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi tahun (n) - ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi tahun (n-1)/ketertiban dalam penyelenggaraan konstruksi tahun (n-1) x100	10	65,85	65,85
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pelatihan dan/atau sertifikasi	Jumlah kegiatan pelatihan dan/atau sertifikasi	10	65,85	65,85
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1	65,85	65,85
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR	Luas Kawasan yang sesuai RTR/Jumlah Luas Kawasan yang dimanfaatkan x 100	100	95	95
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan RTR	Jumlah Dokumen PERKADA	2	1	50
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kab./Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2	1	50
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang	Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang	100	1	1

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1	1	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang	Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang	100	95	95
Pengawasan TURBINLAK dan	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	2	2	100

Sumber : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

Capaian Kinerja Lainnya

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

a. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

Tabel 3.11
Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

b. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 3.12
Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						ANGGARAN (Rp.)
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET (2024)	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	400	setiap tahun	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	200	setiap tahun	1.100.000.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1220	setiap tahun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/S PALD-S	425	setiap tahun	5.122.369.000

c. Anggaran SPM Pekerjaan Umum

Tabel 3.13
Anggaran Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	
		APBD	APBN/Lainnya
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100.000.000	1.000.000.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	25.000.000	5.097.369.000

d. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Tabel 3.14
Jumlah Personil Pengampu SPM

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	Strata 3	
2	Strata 2	8

3	Diploma 3	1
4	SLTA	3
5	SLTP	0
6	SD	1

e. Hasil Capaian

Tabel 3.15
Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar Air Minum Sehari-hari

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENT ASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (5 x 80%)
		jumlah yang harus dilayani (orang)	jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	400	400	100	80

Tabel 3.16
Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan

No	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 X 100)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	200	200	100	20
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	200	200	100	20

Tabel 3.17
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik

No	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (5 x 80%)
		jumlah yang harus dilayani (orang)	jumlah yang terlayani (orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	1220	1220	100	80

Tabel 3.18
Indeks Pencapaian Mutu SPALD

No	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 X 100)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	jumlah mutu barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	425	425	100	20
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	425	425	100	20

Tabel 3.19
Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	Tuntas Paripurna
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	100	Tuntas Paripurna

Tabel 3.20
Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian SPM

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	INTERNAL	Anggaran dari Daerah belum memadai untuk memenuhi capaian SPM Air Minum dan Air Limbah	Penambahan Anggaran APBD
II	EKSTERNAL		
1	Sumber Mata Air	Keterbatasan Sumber Mata Air	Perluasan Peresapan Air dan Penampungan Air Baku

Tabel 3.21
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jumlah Anggaran Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.100.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	100.000.000
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.122.369.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.122.369.000
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.122.369.000

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Sasaran 1 *Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan*

Perbandingan Kinerja:

- Realisasi Indeks Aksesibilitas Jalan tahun ini: 0,41
- Target jangka menengah: 0,50
- Capaian kinerja mencapai 78,85 %

menunjukkan bahwa peningkatan pemerataan dan kualitas Pembangunan jalan dan jembatan sudah berjalan cukup baik meskipun belum mencapai target.

Faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain:

- Keterbatasan anggaran, sehingga belum semua ruas prioritas dapat ditangani dalam satu tahun anggaran.
- Kerusakan jalan akibat beban lalu lintas berat serta faktor cuaca.
- Sebaran wilayah yang luas, sehingga pemerataan pembangunan jalan maupun pemeliharaan jalan membutuhkan waktu dan pembiayaan bertahap.
- Fokus penanganan masih pada ruas dengan tingkat kerusakan berat.

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

- Adanya prioritas pada ruas penghubung antar kecamatan dan pusat ekonomi.
- Peningkatan kegiatan pemeliharaan rutin.
- Perencanaan berbasis data kondisi jalan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

- Penetapan skala prioritas berbasis tingkat kerusakan dan fungsi jalan.
- Peningkatan alokasi anggaran secara bertahap.
- Optimalisasi pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencegah kerusakan berat.
- Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk dukungan pendanaan.
- Penguatan pengawasan mutu pekerjaan konstruksi.

➤ *Sasaran 2 Meningkatkan Akses Layanan Dasar*

Perbandingan Kinerja:

Realisasi Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar tahun ini: 74,84

Target jangka menengah: 79,20

Capaian kinerja mencapai 94,49

menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan dasar sudah berjalan baik dan mendekati target, kinerja yang dicapai sudah cukup optimal.

Faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain:

- Keterbatasan anggaran dibandingkan kebutuhan riil di lapangan.
- Beberapa pekerjaan mengalami keterlambatan pelaksanaan

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

- Dukungan pendanaan dari APBD maupun pemerintah pusat.
- Koordinasi yang baik antar perangkat daerah.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

- Mengoptimalkan sumber pendanaan dari pusat dan provinsi.
- Mempercepat proses perencanaan dan pengadaan.
- Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

➤ *Sasaran 3: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air*

Perbandingan Kinerja:

Realisasi Persentase Ketersediaan Air Baku tahun ini: 46,01%

Target jangka menengah: 60%

Capaian kinerja mencapai 76,68%

menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketersediaan air baku sudah berjalan, namun masih belum optimal, masih diperlukan peningkatan kapasitas infrastruktur sumber daya air.

Faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain:

- Banyak jaringan irigasi yang sudah tua dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan.
- Kerusakan akibat banjir atau cuaca ekstrem.
- Keterbatasan anggaran dibandingkan luasnya jaringan yang harus ditangani.

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

- Adanya kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara rutin.
- Pembangunan embung, bendung, dan saluran air untuk mendukung kebutuhan pertanian dan pengendalian banjir.
- Dukungan anggaran dari APBD dan bantuan pemerintah pusat.
- Koordinasi dengan kelompok tani dan pemerintah desa dalam pemeliharaan jaringan irigasi.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

- Memprioritaskan perbaikan pada jaringan irigasi yang rusak berat dan berdampak langsung pada produksi pertanian.
- Mengoptimalkan sumber pendanaan dari pusat dan provinsi.

- Meningkatkan kegiatan operasi dan pemeliharaan rutin.
- Melibatkan masyarakat dan kelompok tani dalam menjaga dan membersihkan saluran irigasi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

➤ *Sasaran 4 Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah*

Perbandingan Kinerja:

Realisasi capaian dokumen rencana tata ruang tahun ini: 4 dokumen

Target jangka menengah: 9 dokumen

Capaian kinerja mencapai 44,44%

menunjukkan bahwa pelaksanaan penyusunan dokumen tata ruang masih belum optimal.

Faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain:

- Masih adanya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang.
- Proses revisi atau penyesuaian dokumen tata ruang membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang.

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

- Tersusunnya dan ditetapkannya dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan.
- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai aturan tata ruang.
- Pemanfaatan sistem informasi tata ruang untuk mendukung pelayanan rekomendasi dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Mempercepat proses revisi atau penyesuaian dokumen tata ruang.
- Mengoptimalkan sistem informasi tata ruang berbasis digital.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha
- Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penegakan aturan tata ruang.

➤ *Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungannya serta Layanan Jasa Konstruksi*

Perbandingan Kinerja:

Realisasi pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan jasa konstruksi hingga ini: 33,33%

Target jangka menengah: 50%

Capaian kinerja mencapai 66,66%

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan layanan jasa konstruksi sudah berjalan, namun belum optimal.

Faktor penghambat yang mempengaruhi antara lain:

- Masih terdapat bangunan yang belum memenuhi standar teknis.
- Keterbatasan tenaga pengawas teknis.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perizinan bangunan.
- Kualitas penyedia jasa konstruksi yang belum merata.

Faktor Pendukung Keberhasilan antara lain:

- Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.
- Penerapan standar teknis dan perizinan bangunan (PBG/SLF) sesuai ketentuan.
- Peningkatan kompetensi penyedia jasa konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi.
- Koordinasi yang baik dalam pengawasan pekerjaan konstruksi.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan :

- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis bangunan gedung.
- Melakukan sosialisasi terkait perizinan dan standar bangunan.
- Mendorong peningkatan kompetensi tenaga konstruksi melalui pelatihan.
- Memperkuat pengendalian mutu pekerjaan konstruksi.

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran per Sasaran Tahun 2025

Adapun penyajian Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran per Sasaran Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.22

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran per Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	0,52	0,41	78,85	27.495.353.380	23.989.868.064	87,25
2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	79,2	74,84	94,49	6.897.369.000	6.744.407.539	97,78
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	60	46,01	99,87	25.391.170.780	18.453.734.703	72,68
4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	9	4	44,44	215.232.345	212.029.850	98,51
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	50	33,33	66,66	2.322.746.200	2.130.286.097	91,71

Sumber : LAPORAN CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

3.2.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23

Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksebilitas Jalan	78,85	87,25	Belum efisien karena capaian kinerja belum terpenuhi 100%
3	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	94,49	97,78	Belum efisien karena capaian kinerja belum terpenuhi 100%
4	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	Persentase Ketersediaan Air Baku	99,87	72,68	Belum efisien karena capaian kinerja belum terpenuhi 100%
5	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	44,44	98,51	Belum efisien karena capaian kinerja belum terpenuhi 100%
6	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	66,66	91,71	Belum efisien karena capaian kinerja belum terpenuhi 100%

Sumber : LAPORAN CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025

Dari tabel diatas Analisis Efisiensi tidak dapat digunakan karena Analisis Efisiensi digunakan apabila capaian kinerja = 100% dan terdapat sisa anggaran.

3.3 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Indikator Kinerja: Pertumbuhan jalan dalam kondisi mantap
Target:83%

Realisasi:71,32%

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan pada Tahun 2025 telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemantapan jalan kabupaten,

yang ditunjukkan dengan capaian sebesar 71,32%. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala jalan.
2. Kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalan dengan tingkat kerusakan berat.
3. Peningkatan kualitas perencanaan teknis dan pengawasan pekerjaan.

Meskipun menunjukkan capaian yang cukup baik, realisasi kinerja belum mencapai target. Beberapa faktor penyebab antara lain:

1. Keterbatasan alokasi anggaran dibandingkan dengan total panjang ruas jalan yang memerlukan penanganan.
2. Tingginya beban lalu lintas dan kendaraan dengan muatan berlebih yang mempercepat kerusakan jalan.
3. Faktor cuaca menimbulkan kerusakan berulang.
4. Adanya penambahan panjang ruas jalan atau perubahan hasil evaluasi kondisi jalan yang mempengaruhi persentase kemantapan.
5. Prioritas pendanaan pada kebutuhan infrastruktur lain yang bersifat mendesak.

Kegiatan yang menunjang antara lain Pemeliharaan rutin jalan kabupaten, Pemeliharaan berkala jalan.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Indikator Kinerja: Persentase bangunan air/irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik.

Target:60%

Realisasi:46,01%

Tingkat Capaian: 76,68%

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air tetap memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi jaringan irigasi dan bangunan air, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi prioritas.
2. Pemeliharaan rutin bangunan air untuk menjaga fungsi layanan irigasi.
3. Perbaikan pintu air dan saluran yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

4. Koordinasi dengan kelompok petani pemakai air (P3A) dalam mendukung operasional dan pemeliharaan.

Beberapa faktor penyebab belum optimalnya kinerja antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan luas dan panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
2. Banyaknya bangunan air yang telah berusia tua dan membutuhkan rehabilitasi berat.
3. Kerusakan akibat bencana alam (banjir, sedimentasi, longsor) yang mempercepat penurunan kondisi fisik.
4. Pendangkalan dan sedimentasi saluran yang memerlukan biaya penanganan cukup besar.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jaringan tersier.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten
- Pemeliharaan rutin dan berkala bangunan air
- Normalisasi dan pembersihan saluran irigasi
- Monitoring dan evaluasi kondisi jaringan irigasi

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator Kinerja: Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak

Target:100%

Realisasi:92,94%

Tingkat Capaian: 92,94%

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Capaian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memperoleh akses air minum layak. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pengembangan dan perluasan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
2. Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas sarana air minum yang telah ada.
3. Pembangunan sarana air minum berbasis masyarakat di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

4. Koordinasi dengan pemerintah desa dan kelompok pengelola sarana air minum.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja antara lain

- Pembangunan dan pengembangan jaringan SPAM
- Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas instalasi air minum
- Penyediaan sarana air minum berbasis masyarakat
- Monitoring kualitas dan keberlanjutan layanan air minum
- Pendampingan pengelolaan sarana air minum

Meskipun capaian sudah tinggi namun target belum sepenuhnya tercapai. Beberapa faktor penghambat antara lain:

1. Masih terdapat wilayah sulit dijangkau jaringan perpipaan.
2. Keterbatasan anggaran untuk perluasan jaringan dan pembangunan SPAM.
3. Keterbatasan sumber air baku di beberapa wilayah.
4. Kerusakan sarana air minum yang belum tertangani seluruhnya.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator Kinerja: Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak.

Target: 98%

Realisasi: 93,01%

Tingkat Capaian: 94,91%

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah yang layak. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi permukiman.
2. Rehabilitasi dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
3. Program bantuan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Koordinasi dengan pemerintah desa dalam mendukung penyediaan sarana sanitasi.

Meskipun capaian sudah tinggi, target belum sepenuhnya tercapai. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih terdapat rumah tangga di wilayah terpencil yang belum memiliki akses sanitasi layak.
2. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sistem air limbah terpusat.
3. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah yang memenuhi standar teknis.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pembangunan sarana sanitasi individual dan komunal
- Bantuan stimulan jamban sehat
- Monitoring dan evaluasi sarana sanitasi

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator Kinerja: Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Mantap

Target:35%

Realisasi:35%

Tingkat Capaian: 100%

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kinerja sehingga pengelolaan program dalam mempertahankan kondisi jaringan drainase tetap berfungsi secara optimal. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase pada lokasi prioritas.
2. Kegiatan normalisasi dan pembersihan saluran secara berkala.
3. Perbaikan titik genangan dan penyempitan saluran.

Meskipun target tercapai, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan persentase kemandapan drainase.
2. Sedimentasi dan penumpukan sampah yang mempengaruhi fungsi saluran.
3. Perubahan tata guna lahan yang meningkatkan debit limpasan air.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase
- Normalisasi dan pembersihan saluran

- Penanganan titik genangan
- Monitoring dan evaluasi kondisi drainase

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Indikator Kinerja: Persentase Kesesuaian Penataan Bangunan Gedung
Target:35%

Realisasi:33,49%

Tingkat Capaian: 95,69%

Pelaksanaan Program Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan penataan bangunan gedung telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung sesuai ketentuan teknis.
2. Fasilitasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
3. Penataan kawasan strategis dan bangunan milik pemerintah daerah.

Meskipun capaian sudah mendekati target, indikator belum mencapai target. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan.
2. Keterbatasan sumber daya pengawasan bangunan gedung.
3. Masih adanya bangunan lama yang belum menyesuaikan dengan ketentuan teknis terbaru.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pengawasan dan pengendalian bangunan gedung
- Fasilitasi penerbitan PBG
- Pembinaan dan sosialisasi regulasi bangunan gedung

7. Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator Kinerja: Persentase Kesesuaian Penataan Bangunan Gedung
Target:100%

Realisasi:96,15%

Tingkat Capaian: 96,15%

Pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung telah berjalan sangat baik dan hampir mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Optimalisasi proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan teknis.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung secara berkala.
3. Peningkatan kepatuhan terhadap standar teknis dan persyaratan keselamatan bangunan.

Meskipun capaian sudah sangat tinggi, target belum sepenuhnya tercapai. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Masih adanya bangunan eksisting yang belum menyesuaikan dengan ketentuan teknis terbaru.
2. Keterbatasan sumber daya pengawasan untuk menjangkau seluruh wilayah.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Fasilitasi penerbitan PBG
- Pengawasan dan pemeriksaan kesesuaian bangunan gedung
- Pembinaan dan sosialisasi regulasi bangunan gedung

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Indikator Kinerja: Pertumbuhan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Konstruksi

Target:10%

Realisasi:10%

Tingkat Capaian: 100%

Pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja tahun berjalan. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi regulasi jasa konstruksi kepada pelaku usaha.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap standar teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi pada proyek pemerintah daerah.
4. Penguatan koordinasi dengan asosiasi jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi.

5. Peningkatan kesadaran pelaku jasa konstruksi terhadap pentingnya tertib administrasi dan mutu pekerjaan.

Meskipun target tercapai, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan ke depan, antara lain:

1. Masih adanya pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami ketentuan terbaru di bidang jasa konstruksi.
2. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pembinaan dan sosialisasi regulasi jasa konstruksi
- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi
- Fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi
- Penguatan pengawasan mutu dan administrasi pekerjaan

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator Kinerja: Pertumbuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR

Target: 100%

Realisasi: 95%

Tingkat Capaian: 95%

Realisasi pelaksanaan Program menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang.
2. Pengawasan dan monitoring pemanfaatan ruang pada kawasan strategis dan berkembang.
3. Sosialisasi regulasi penataan ruang kepada masyarakat dan pelaku usaha.
4. Koordinasi lintas sektor dalam proses perizinan berusaha berbasis tata ruang.

Meskipun capaian sudah sangat baik namun belum sepenuhnya tercapai. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukan RTR.

2. Ketearbatasan pengawasan di seluruh wilayah kabupaten.
3. Belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.
4. Dinamika perubahan kebijakan dan kebutuhan revisi dokumen RTR.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Sosialisasi dan pembinaan regulasi tata ruang
- Pengembangan sistem informasi tata ruang
- Monitoring dan evaluasi implementasi RTR

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Target:72,72

Realisasi: 64,95

Tingkat Capaian:

Realisasi Nilai SAKIP sebesar menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan cukup baik. Beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja, LKjIP) yang semakin sistematis.
2. Penerapan cascading kinerja dari level pimpinan hingga pelaksana.
3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
4. Peningkatan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
5. Pemanfaatan aplikasi pendukung perencanaan dan pelaporan kinerja.

Meskipun menunjukkan progres, capaian belum memenuhi target 72,72.

Beberapa kendala yang mempengaruhi antara lain:

1. Kualitas perumusan indikator kinerja yang belum sepenuhnya berorientasi outcome.
2. Keterbatasan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan program.
3. Belum optimalnya pengukuran dan analisis capaian kinerja secara mendalam.

4. Keterbatasan kapasitas SDM dalam implementasi manajemen kinerja berbasis hasil.

Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Penyusunan dan reviu dokumen perencanaan kinerja
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
- Penyusunan LKjIP dan laporan kinerja lainnya
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM terkait SAKIP
- Penguatan sistem pengendalian internal

3.4 Lintas Sektor

Tabel 3.24
Kegiatan Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kegiatan lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
1.	Program TMMD Sengkuyung dalam rangka Mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Rembang	TNI, DPUTARU, Polres, Sekda, Pemerintah Desa, Masyarakat	- TMMD Tahap I Sengkuyung Tahun 2025 kegiatan fisik yang berupa pembangunan rabat beton sepanjang 280 meter dan 140 meter dengan lebar 2,5 meter, jalan grosok pudel sepanjang 320 meter, pembangunan talud plat, plat beton, serta pembuatan dua buis beton masing-masing sepanjang 3 meter dengan diameter 30 sentimeter yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Desa Woro semakin baik dan mampu mendorong	Pembangunan fisik yang dilakukan untuk membantu progres pembangunan di desa.	Masyarakat Kabupaten Rembang	Bagi OPD : Mendukung pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pemerataan dan kualitas Pembangunan jalan dan jembatan. Bagi Kelompok Sasaran : Dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

No.	Kegiatan lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
			peningkatan perekonomian masyarakat setempat.			
			- TMMD Sengkuyung Tahap II adalah pengaspalan jalan sepanjang 550 meter dengan lebar 2,5 meter dan ketebalan 7 cm. Infrastruktur ini diharapkan dapat menunjang mobilitas warga serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Desa Temperak, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.			
			- TMMD Tahap III mencakup pembangunan jembatan sepanjang 6 meter dengan lebar 4 meter dan tinggi 4 meter, rabat jalan sepanjang 155 meter, dan Pembangunan talud jalan sepanjang 68			

No.	Kegiatan lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
			meter dengan tujuan meningkatkan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas warga di Desa Pelemsari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.			
			- TMMD Tahap IV Sengkuyung Tahun 2025 kegiatan fisik yang berupa pengeprasan jalan tanjakan yang menghubungkan Desa Pasedan Kecamatan Bulu dengan Desa Ngotoko yang menanjak sepanjang sekitar 135 meter, sudah berhasil dikepras hingga dua meter, serta pengecoran jalan sepanjang 1.135 meter.			
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana	Ditjen Tata Ruang, Dinas Pusdataru Prov. Jawa Tengah, Kementerian Agraria dan Tata	- Proses mempersiapkan ruang untuk pembangunan 20 tahun kedepan dengan muatan-muatan strategis dalam	RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2022-2042 dalam	Masyarakat Kabupaten Rembang	Bagi OPD : Penyusunan RTRW yang terintegrasi dengan perizinan sistem OSS untuk

No.	Kegiatan lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
	Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2022-2042.	Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), DPUTARU Kab. Rembang	RTRW, meliputi Garis Pantai; Batas administrasi; Kawasan Hutan; Kawasan Pertanian; Mitigasi Bencana; serta Kawasan Lindung.	rangka mewujudkan wilayah Kabupaten Rembang sebagai pusat perekonomian regional Jawa Tengah bagian timur yang produktif, berkelanjutan dan berdaya saing bertumpu pada keterkaitan sektor industri, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, serta memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah.		menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Bagi Kelompok Sasaran : mewujudkan wilayah Kabupaten Rembang sebagai pusat perekonomian regional Jawa Tengah bagian timur untuk kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Rembang.

No.	Kegiatan lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK SASARAN	
3.	Program Konservasi SDA	- Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Konservasi SDA, Balai Konservasi SDA Prov. Jateng, DLH Kab. Rembang, DPUTARU	- Penanaman 10.000 mangrove di Kawasan Ekonomi Essensial (KEE) Pasarbanggi, sebagai upaya rehabilitasi ruang terbuka hijau (RTH).	- Terlaksananya rehabilitasi ruang terbuka hijau (RTH) di Pasarbanggi, Kecamatan Rembang	- Masyarakat Kabupaten Rembang	- Bagi OPD : Mendukung dan menjaga kelestarian sumber daya air dan ketersediaan air, menjaga infrastruktur pengaman pantai terhadap bencana abrasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Realisasi Kinerja Perangkat daerah Berdasarkan Target Yang Ditetapkan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 secara umum realisasi kinerja menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan.

Sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Indikator-indikator utama menunjukkan tingkat capaian yang mendekati bahkan melampaui target pada beberapa aspek, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan, penyelenggaraan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan anggaran, dinamika kebijakan,

kendala teknis di lapangan, serta faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi. Meskipun demikian, capaian kinerja secara keseluruhan masih berada dalam kategori cukup efektif.

4.1.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 didukung oleh perencanaan yang tersusun secara sistematis dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang baik tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, komitmen pimpinan serta kerja sama yang baik antarbidang dalam organisasi turut berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi yang efektif dan tanggung jawab yang jelas memberikan kontribusi terhadap tercapainya sasaran kinerja secara optimal.

Dukungan anggaran yang memadai, regulasi yang jelas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor pendukung utama. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada periode berikutnya, diperlukan langkah-langkah perbaikan kinerja yang terencana dan berkelanjutan. Upaya perbaikan tersebut diarahkan tidak hanya pada pencapaian target kinerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil (outcome) dan manfaat bagi pemangku kepentingan. Pertama, Perangkat Daerah akan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui penajaman sasaran dan indikator kinerja yang lebih terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja akan lebih difokuskan pada capaian outcome

yang mencerminkan dampak pelaksanaan program dan kegiatan, serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada pihak- pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, Februari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KAB REMBANG



MARYOSA, A.TD., M.T

Penbina Utama Muda
NIK 19671211 199003 1 007

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK IKU

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Kepala DPUTARU Tahun 2025

Lampiran 3 SK Tim Penyusun LKJIP

Lampiran 4 SOP Pengumpulan Data Kinerja

Lampiran 5 Profil Indikator Kinerja

Lampiran 6 Pohon Kinerja

Lampiran 7 Cascading

Lampiran 8 Piagam Penghargaan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax. (0295) 691033
REMBANG 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 900 / 016 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/ M. PAN / 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core bisnis* perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG



Drs. EC. GANTIARTO, St.

Pembina Tingkat I

NIP. 19651226 199401 1 001


Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kesubag	
Pelaksana	

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
 Nomor : 900 / ab / 2022
 Tanggal : Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2021 - 2026**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITINGAN	
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	%	Sebagai upaya dalam mewujudkan infrastruktur jalan dalam kondisi baik untuk menghubungkan seluruh wilayah di Kab. Rembang	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap / Total luas wilayah administrasi	DPUTARU
2.	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	%	pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum serta pemenuhan target SDGs tahun 2030	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar (akses air minum ditambah akses sanitasi dibagi dua kali 100%)	DPUTARU
3.	Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air	% Ketersediaan Air Baku	%	Sebagai upaya pemenuhan ketersediaan air baku	Jumlah ketersediaan air baku dibagi kebutuhan air baku x 100 %	DPUTARU
4.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Rasio Pemanfaatan Ruang	%	Sebagai upaya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang	Jumlah pemanfaatan ruang dibagi jumlah luas rencana tata ruang x 100 %	DPUTARU

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITINGAN	
5.	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi	% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi	%	sebagai upaya peningkatan pelayanan bangunan gedung dan jasa konstruksi	Jumlah % Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi tahun t dikurangi tahun t-1 dibagi tahun t-1 kali 100%	DPUTARU





 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

 PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG

Dis. EC. GANTIARTO, St.

Pembina Tingkat I
 NIP. 19651226 199401 1 001

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kasubag	
Pelaksana	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan P. Diponegoro No. 101 Telp (0295) 691033 Fax (0295) 691033 Rembang
Kode Pos 59211

Website : dputaru.rembangkab.go.id, e-mail : dputaru@rembangkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARYOSA, A.TD. ,MT
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua


H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Pihak Pertama


MARYOSA, A.TD. ,MT
Pembina Utama Muda
NIP.196712111990031007

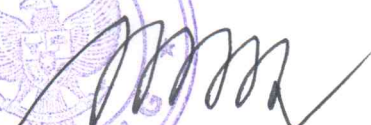
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan		
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	70,44
2.	Sasaran Strategis		
2.1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Jalan	0,52
2.2	Meningkatnya Akses Layanan Dasar	Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar	79,20
2.3	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Ketersediaan Air Baku	60 %
2.4	Meningkatnya Perwujudan Rencana Tata Ruang Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Program Rencana Tata Ruang	9 %
2.5	Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya Serta Layanan Jasa Konstruksi	Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung Dan Jasa Konstruksi	50 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 10.797.312.692	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 21.875.000.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 5.122.369.000	APBD/APBN
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 825.000.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 3.238.000.000	APBD
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 5.000.000.000	APBD
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 103.302.631.000	APBD/APBN
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 12.000.000	APBD
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 75.000.000	APBD
	Jumlah	Rp 150.247.312.692	

Rembang, 20 Januari 2025

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG**



MARYOSA, A.TD., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196712111990031007



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. P. Diponegoro No. 101 Telp. (0295) 691033 Fax.(0295) 691033
Rembang - 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 900/ 015 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja merupakan salah satu komponen yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai SAKIP Tahun Anggaran 2024 disusun di Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan secara terintegrasi meliputi perencanaan, penganggaran, manajemen kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah/ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim tersebut diktum KESATU sebagai berikut :

a. Umum :

1. menyusun dan melaksanakan review internal dokumen perencanaan;
2. mendorong dan melaksanakan penerapan anggaran berbasis kinerja, meliputi indikator kinerja utama, berdasarkan dokumen RPJMD, penyusunan Renstra sesuai dengan indikator kinerja utama kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, melaksanakan penyesuaian Renja dengan menyesuaikan IKU kabupaten, melaksanakan Cascading dan penyusunan rencana aksi Perjanjian Kinerja (PK);

3. mendorong dan melaksanakan penyusunan anggaran berbasis *out come*;
4. melaksanakan monitoring evaluasi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK); dan
5. memanfaatkan hasil evaluasi untuk upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

b. Khusus :

1. Penanggungjawab

- a) menyetujui rancangan keputusan tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024; dan
- b) memberikan arahan kepada Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Ketua

- a) mengajukan usulan rancangan keputusan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024;
- b) merumuskan kebijakan teknis rancangan dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c) melaksanakan fungsi koordinasi, supervisi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- d) mengajukan rancangan Dokumen Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2024.

3. Wakil Ketua

- a) mengkoordinir penyiapan bahan rumusan rancangan kebijakan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b) mengkoordinir konsultasi, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- c) mengkoordinir fungsi kesekretariatan.

4. Sekretaris

- a) menyiapkan dan menyediakan kelengkapan dan fungsi kesekretariatan kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- b) menyiapkan fasilitasi dukungan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.

5. Anggota

- a) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Kebinamargaan.
- b) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Sumber Daya Air;
- c) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Tata Ruang;
- d) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Sanitasi dan Air Minum; dan
- e) mengkoordinir penyiapan data informasi rumusan kebijakan yang diperlukan untuk Penyusunan Rancangan Dokumen LKPD, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2025



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Rembang

MARYOSA, ATD., M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19671211 199003 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 900 / 015 /2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
2.	Ketua	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
3.	Wakil Ketua	Kasubbag Program dan Keuangan
4.	Sekretaris	Pelaksana pada Subbag Program dan Keuangan
5.	Anggota	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
6.	Anggota	Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
7.	Anggota	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
8.	Anggota	Kepala Bidang Sanitasi dan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
9.	Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang
10.	Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11.	Anggota	Kepala UPT. Perbengkelan dan Alat Berat

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG



MARYOSA, A.TD., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671211 199003 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NOMOR SOP : DPUTARU/SEK/Kasubbag
Program dan Keuangan/07/2025
TGL.PEMBUATAN : 7 Januari 2025
TGL.REVISI :
TGL. EFEKTIF : Januari 2025
DI SAHKAN OLEH :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Rembang
MARYOSA, ATD. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196712111990031007

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENGUMPULAN
DATA KINERJA

DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama DPUTARU;
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama DPUTARU;
3. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan DPUTARU;
4. Memiliki pengetahuan tentang perencanaan kinerja;
5. Memahami tentang teknis pengumpulan data kinerja;
6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-DPUTARU);
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPUTARU);
3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-DPUTARU);
4. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK-DPUTARU);
5. SOP Monitoring Renstra;
6. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1. ATK;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-DPUTARU);
5. Instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan,






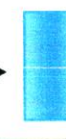












PERINGATAN :

1. Apabila kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan pengumpulan data belum dapat dilakukan dan dicatat NIHIL dalam capaian kinerja;
2. Diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Sekretariat dan Bidang/Seksi yang terkait;
3. Pengumpulan data dilaksanakan setiap bulan sebelum tanggal 10.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Rumusan rencana program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid/Kasubag	Tim Penyusun SAKIP/LKJIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1.	Memerintahkan pengumpulan data kinerja							Struktur organisasi, surat perintah	20 Menit	Disposisi perintah, surat	
2.	Penyusunan anggota tim pelaksana							Draft anggota tim	1 jam	SK tim	
3.	Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data							SK tim, time schedule	3 hari	Rencana kerja tim	
4.	Menghimpun data kinerja dan menyusun konsep laporan sesuai format yang telah ditentukan							Data dari seksi/ bidang	5 hari	Konsep laporan, data-data	Sesuai dengan SOP Pengukuran Kinerja
5.	Laporan Kabid/Kasubag kepada Sekretaris terkait data kinerja masing-masing indikator kinerja							Konsep laporan	1 hari	Konsep laporan, data-data	
6.	Melakukan rapat internal dengan tim SAKIP							Data dan laporan	2 jam	Laporan kinerja dan notulen	
7.	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan							Draft Laporan data Kinerja	2 jam	Laporan data Kinerja	
8.	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Kepala Dinas.							Laporan data Kinerja dan lembar disposisi	1 jam	Disposisi Kepala Dinas	
9.	Hasil Pengumpulan Data kinerja dikirim kepada Sekretaris Daerah dan BAPPEDA melalui aplikasi atau instrument lainnya kemudian diarsipkan.							Data kinerja yang telah selesai	1 hari	Laporan Kinerja yang sudah siap	



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NOMOR SOP : DPUTARU/SEK/Kasubbag
Program dan Keuangan/07/2025
TGL.PEMBUATAN : 7 Januari 2025
TGL.REVISI :
TGL. EFEKTIF : Januari 2025
DI SAHKAN OLEH :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Rembang
MARYOSA, ATD. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 196712111990031007

NAMA SOP : PELAKSANAAN PENGUMPULAN
DATA KINERJA

DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama DPUTARU;
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama DPUTARU;
3. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan DPUTARU;
4. Memiliki pengetahuan tentang perencanaan kinerja;
5. Memahami tentang teknis pengumpulan data kinerja;
6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-DPUTARU);
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPUTARU);
3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-DPUTARU);
4. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK-DPUTARU);
5. SOP Monitoring Renstra;
6. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1. ATK;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-DPUTARU);
5. Instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan,






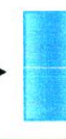






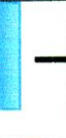





PERINGATAN :

1. Apabila kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan pengumpulan data belum dapat dilakukan dan dicatat NIHIL dalam capaian kinerja;
2. Diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Sekretariat dan Bidang/Seksi yang terkait;
3. Pengumpulan data dilaksanakan setiap bulan sebelum tanggal 10.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Rumusan rencana program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR: PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid/Kasubag	Tim Penyusun SAKIP/LKJIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1.	Memerintahkan pengumpulan data kinerja							Struktur organisasi, surat perintah	20 Menit	Disposisi perintah, surat	
2.	Penyusunan anggota tim pelaksana							Draft anggota tim	1 jam	SK tim	
3.	Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data							SK tim, time schedule	3 hari	Rencana kerja tim	
4.	Menghimpun data kinerja dan menyusun konsep laporan sesuai format yang telah ditentukan							Data dari seksi/ bidang	5 hari	Konsep laporan, data-data	Sesuai dengan SOP Pengukuran Kinerja
5.	Laporan Kabid/Kasubag kepada Sekretaris terkait data kinerja masing-masing indikator kinerja							Konsep laporan	1 hari	Konsep laporan, data-data	
6.	Melakukan rapat internal dengan tim SAKIP							Data dan laporan	2 jam	Laporan kinerja dan notulen	
7.	Sekretaris menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan							Draft Laporan data Kinerja	2 jam	Laporan data Kinerja	
8.	Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan data kinerja kepada Kepala Dinas.							Laporan data Kinerja dan lembar disposisi	1 jam	Disposisi Kepala Dinas	
9.	Hasil Pengumpulan Data kinerja dikirim kepada Sekretaris Daerah dan BAPPEDA melalui aplikasi atau instrument lainnya kemudian diarsipkan.							Data kinerja yang telah selesai	1 hari	Laporan Kinerja yang sudah siap	

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja³⁾	: Presentase Ketersediaan Air Baku
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	: menunjukkan sejauh mana Bidang SDA dapat menghasilkan Program Pembangunan dan Pengelolaan Irigasi yang tepat sasaran dan dapat memaksimalkan semua potensi yang dimiliki untuk dapat mencapai target yang sudah direncanakan yaitu menambah ketersediaan air baku, menghitung kebutuhan air baku, dan upaya menjaga ketersediaan air baku yang sudah ada.
Jenis Pengawasan	: Melakukan identifikasi usulan pembangunan Embung, Rehabilitasi Embung dan Jaringan nya, memaksimalkan peran Komisi Irigasi, Melakukan Upaya Pemberdayaan kepada kelompok petani pemakai air, koordinasi dan kerja sama dengan OPD terkait
Rumus Pengukuran	: $\text{Ketersediaan Air Baku} = \frac{\text{jumlah ketersediaan air baku}}{\text{kebutuhan air baku}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang mendukung, ketersediaan anggaran, kecukupan SDM Bidang SDA, hubungan yang baik dengan OPD terkait, GP3A, P3A dan Pemerintah Desa.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: peraturan/kebijakan yang menghambat, Ketersediaan Lahan, ketidakcukupan anggaran, hubungan yang kurang baik dengan OPD terkait, GP3A, P3A dan Pemdes.
Unit Kerja Pelaksana	: Bidang Sumber Daya Air
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak kumulatif
Sumber data	: DPA, Data Hasil Survey

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan : **Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh**
Outcome²⁾ : **Layanan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik,**
Drainase dan Persampahan.

Indikator Kinerja³⁾	: Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik, Drainase dan Persampahan
Definisi Indikator Kinerja	: Menunjukkan Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan Infrastruktur Air Minum, Air Limbah Domestik, Drainase dan Persampahan
Tujuan	: Untuk meningkatkan dan memenuhi layanan dasar infrastruktur Bidang Air Minum, Air Limbah Domestik, Drainase, dan Persampahan.
Rumus Pengukuran	: $\frac{\text{Capaian Air Minum} + \text{Air Limbah Domestik} + \text{drainase} + \text{persampahan}}{3}$
Jenis Pengawasan	: Melakukan Monitoring dan Evaluasi
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	: Peraturan/Kebijakan yang mendukung, Kecukupan Anggaran, Hubungan yang baik dengan Pemdes
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	: Keterbatasan Sumber Daya, Ketersediaan Data dan Keterbatasan Anggaran
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Sanitasi dan Air Minum
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber Data	: DPA, Data Hasil Survey

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Perwujudan Pencapaian Rencana Tata Ruang Daerah**

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase Capaian Perwujudan Pencapaian Rencana Tata Ruang
Definisi Indikator Kinerja	:	suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyusunan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dapat diwujudkan dalam peraturan rencana tata ruang. indikator ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase yang menggambarkan proporsi atau bagian dari rencana tata ruang yang telah berhasil disusun.
Tujuan	:	untuk mengukur dan mengevaluasi rencana tata ruang yang telah direncanakan sampai dengan penetapan
Rumus Pengukuran	:	Persentase Capaian = $\frac{\text{jumlah dokumen RTR yang ditetapkan}}{\text{jumlah dokumen RTR yang direncanakan}} \times 100\%$
Jenis Pengawasan	:	dilakukan melalui berbagai jenis pengawasan/pengendalian untuk memastikan bahwa rencana tata ruang dapat ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Konsultasi dan koordinasi dengan OPD, Pemerintah Provinsi, Kementerian ATR, maupun lembaga terkait dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2. Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1); 3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional; 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,

		<p>Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;</p> <p>5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;</p> <p>6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043.</p>
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<p>1. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan RTR;</p> <p>2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka penyusunan RTR;</p> <p>3. Partisipasi publik atau keterlibatan masyarakat yang kurang maksimal dalam proses perencanaan dan pengawasan;</p>
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Ruang
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber Data		DPA, Data Hasil Survey

Kode Outcome¹⁾ :
Pernyataan Outcome²⁾ : **Capaian Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi**

Indikator Kinerja³⁾	:	Persentase Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
Definisi Indikator Kinerja	:	suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penyusunan pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan Jasa Konstruksi dapat dicapai. indikator ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase yang menggambarkan proporsi pertumbuhan bantuan teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi yang telah berhasil dicapai.
Tujuan	:	untuk mengukur dan mengevaluasi pertumbuhan bantuan teknis Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi
Rumus Pengukuran	:	Presentase Pertumbuhan = $\frac{\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun (n)} - \text{bantuan teknis bangunan dan jasa konstruksis tahun (n-1)}}{\text{Bantuan Teknis Bangunan dan Jasa Konstruksi tahun n-1}} \times 100\%$
Jenis Pengawasan	:	dilakukan melalui berbagai jenis monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa pertumbuhan bantuan teknis bangunan gedung dan bina jasa konstruksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana . Konsultasi dan koordinasi dengan OPD dan Rekanan yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hal Hal Yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Hal Hal Yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	a. Keterbatasan pendanaan/anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;

		b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pelaksanaan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber Data		DPA

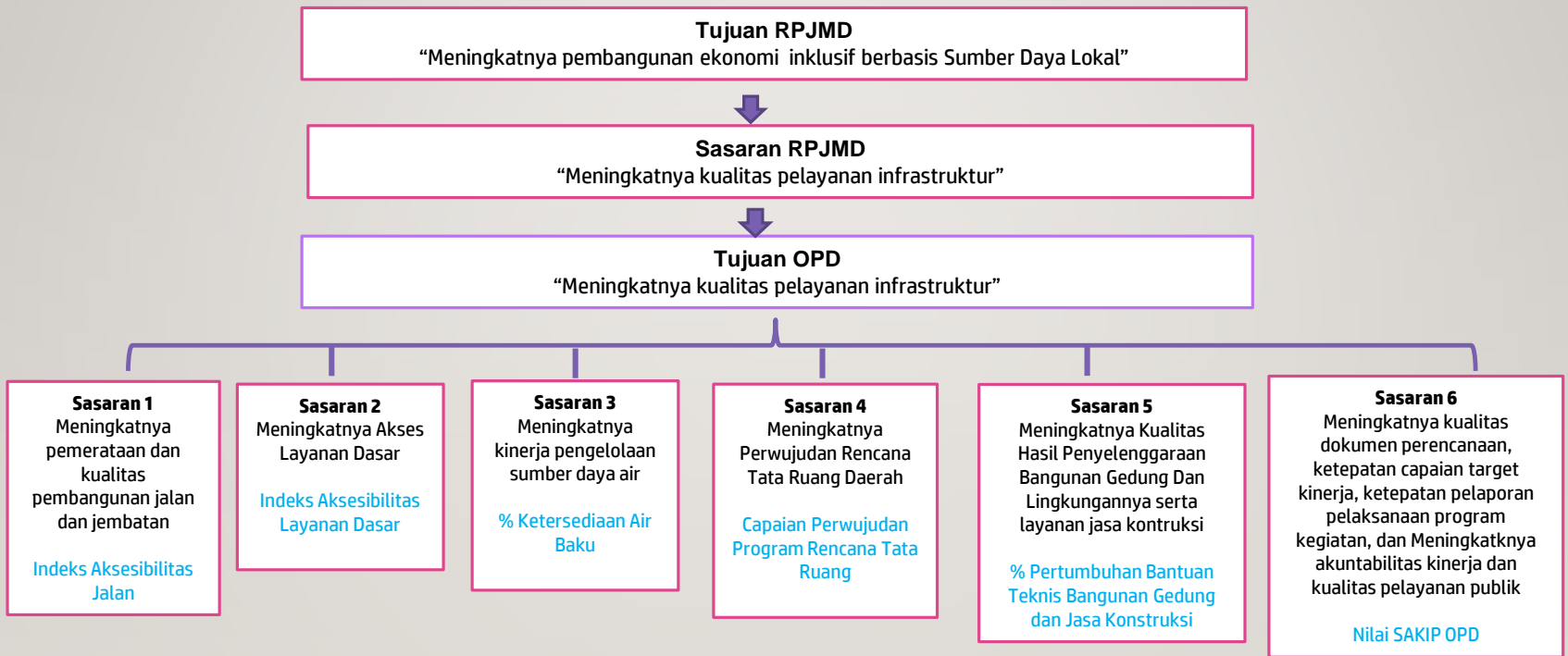


POHON KINERJA
DPUTARU KAB. REMBANG

2021 -2026

Visi : REMBANG GEMILANG 2026

Misi : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



Sasaran 1

Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan
Indeks Aksesibilitas Jalan



Penyelenggaraan Jalan
Persentase jalan dalam kondisi mantap

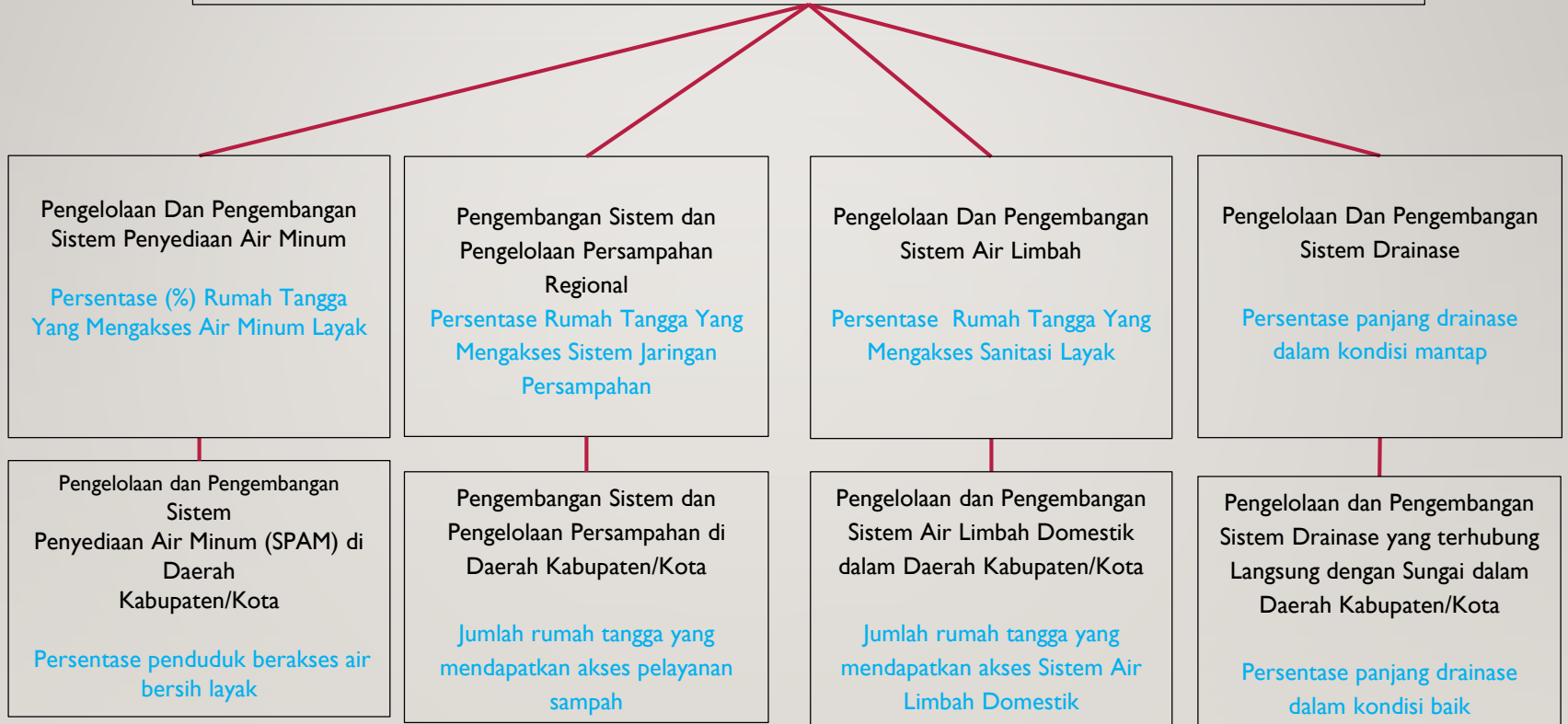


Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
Persentase jalan dalam kondisi baik
Persentase jembatan dalam kondisi baik

Sasaran 2

Meningkatnya Akses Layanan Dasar

Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar



Sasaran 3

Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air
Persentase Ketersediaan Air Baku



Pengelolaan Sumber Daya Air
Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Persentase jumlah bangunan air dalam kondisi baik

Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Dokumen Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Terbangunnya Embung dan Penampung Air

Normalisasi/ Restorasi / pemeliharaan Sungai

Terbangunnya Pengamanan Sungai

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/Kota

Persentase jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Panjang jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi

Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Panjang jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi

Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air irigasi

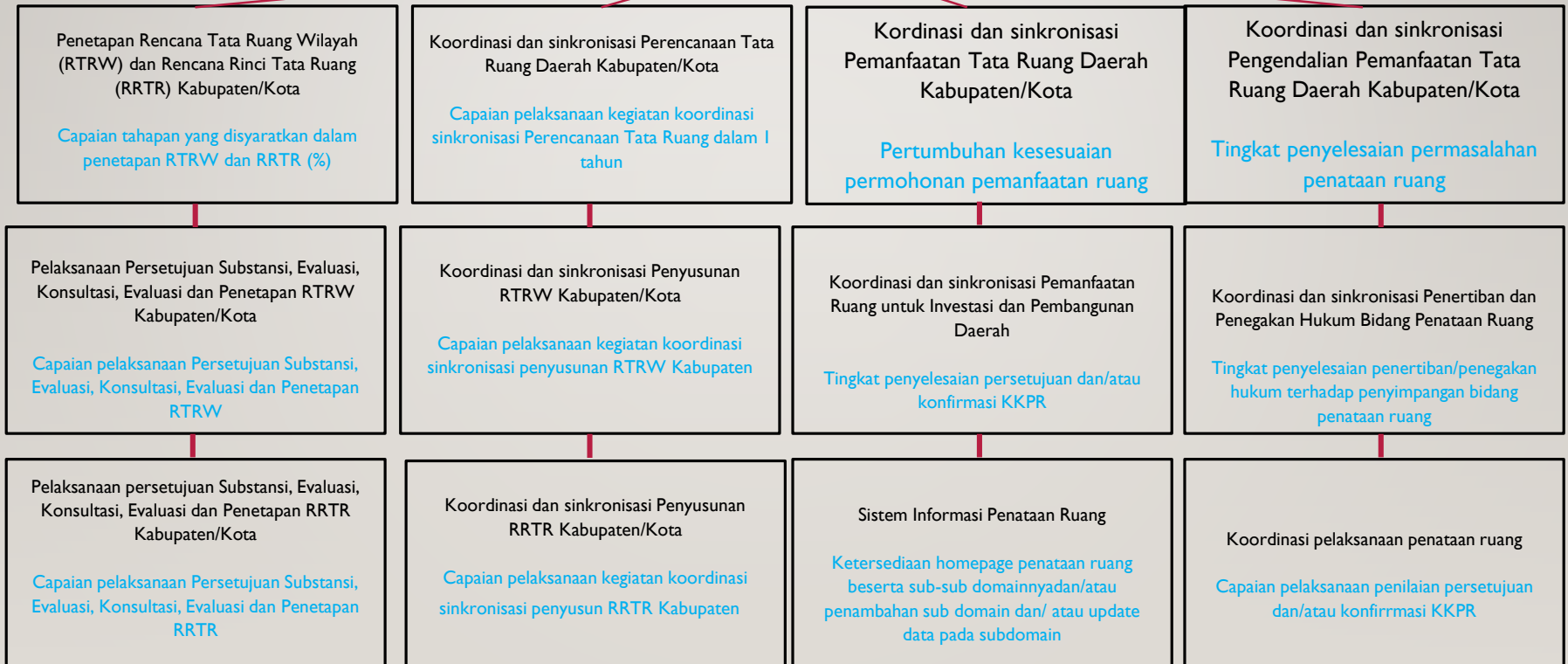
Dokumen Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air irigasi

Sasaran 4

Meningkatnya perwujudan rencana tata ruang daerah
Capaian perwujudan program rencana tata ruang

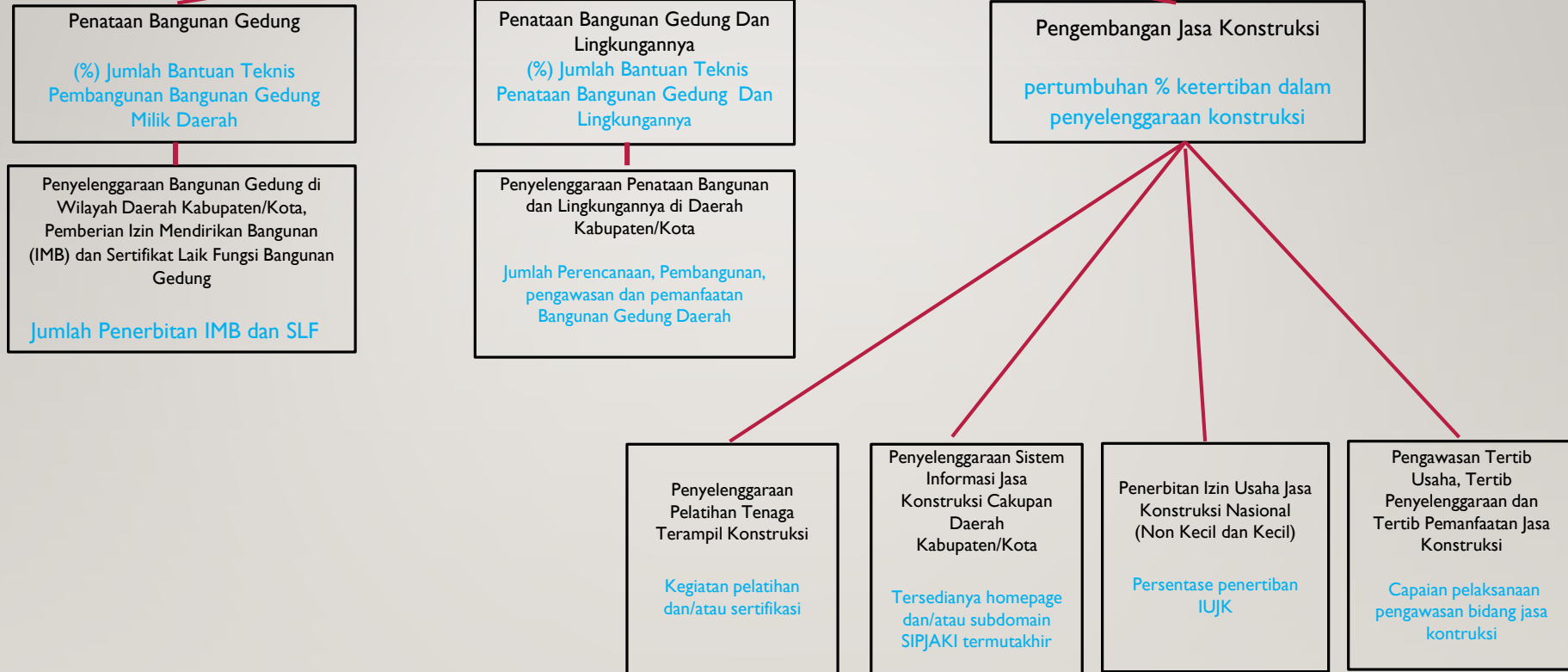


Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pertumbuhan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR



Sasaran 5

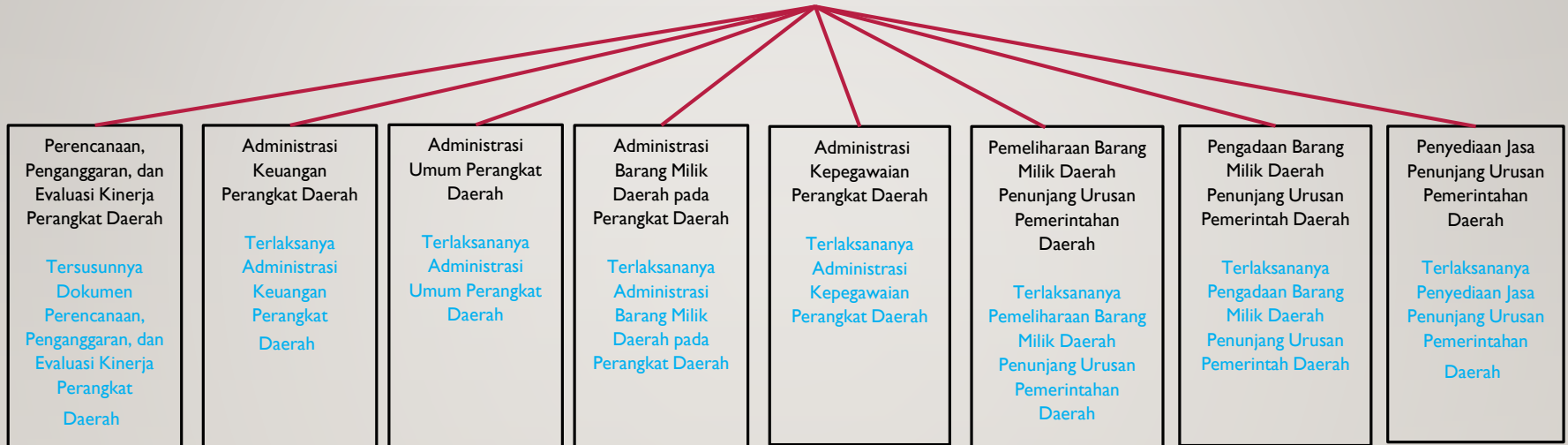
Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya serta layanan jasa konstruksi
% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi



Sasaran 6

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan, pelaksanaan program kegiatan, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

Nilai SAKIP OPD

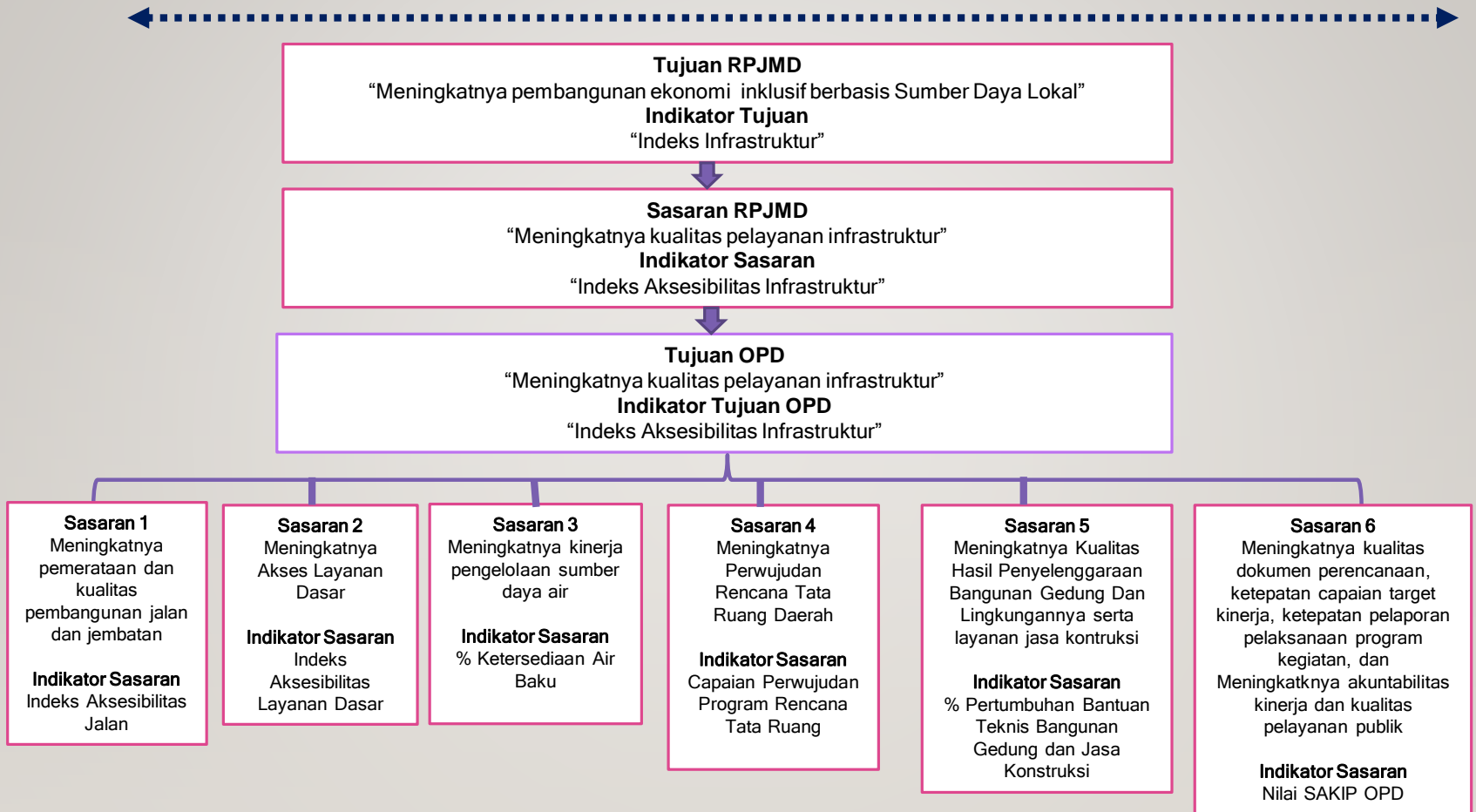




CASCADING DPUTARU KAB. REMBANG

2021 -2026

Misi III : Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



Sasaran 1
Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan
Indikator
Indeks Aksesibilitas



Program
Program Penyelenggaraan Jalan
Indikator
Persentase jalan dalam kondisi mantap



Kegiatan
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
Indikator

1. Persentase jalan dalam kondisi baik
2. Persentase jembatan dalam kondisi baik

Sub Kegiatan

1. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan indikator Luas lahan/tanah yang dibebaskan
 2. Survey kondisi jalan dan jembatan Indikator
 - a) Data Kondisi Jalan
 - b) Data Kondisi Jembatan
 3. Pembangunan Jalan Indikator Panjang jalan yang dibangun
 4. Pelebaran Jalan Menuju Standar Indikator Panjang jalan yang dilebarkan
 5. Rehabilitasi Jalan Indikator Panjang jalan yang direhabilitasi
 6. Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Panjang jalan yang dipelihara
 7. Pembangunan Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang dibangun
 8. Penggantian Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang dilakukan penggantian
 9. Pelebaran Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang dilebarkan
 10. Rehabilitasi Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang direhabilitasi
 11. Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang dipelihara
 12. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Indikator:
 - a) Panjang jalan yang ditanggulangi/perbaiki
 - b) Jumlah jembatan yang ditanggulangi/perbaiki
 13. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Indikator :
 - a) Panjang Jalan yang dipantau dan dievaluasi
 - b) Jumlah Jembatan yang dipantau dan dievaluasi
- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Indikator :
- a) Panjang Jalan yang diawasi
 - b) Jumlah Jembatan yang diawasi

Sasaran 2
Meningkatnya Akses Layanan Dasar
Indikator
Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar

Program
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Indikator
Persentase (%) Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak

Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
(%) penduduk berakses air bersih layak

Program
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Indikator
Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sistem Jaringan Persampahan

Kegiatan
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pelayanan sampah

Program
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Indikator
Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sanitasi Layak

Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses Sistem Air Limbah Domestik

Program
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Indikator
persentase panjang drainase dalam kondisi mantap

Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
persentase panjang drainase dalam kondisi baik

Program

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator

Persentase (%) Rumah Tangga Yang Mengakses Air Minum Layak

Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator

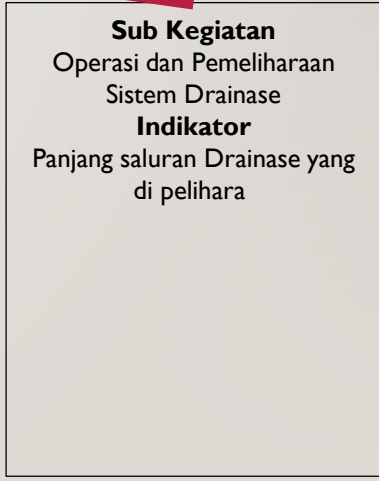
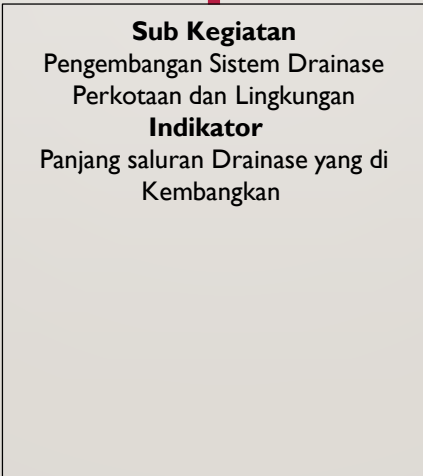
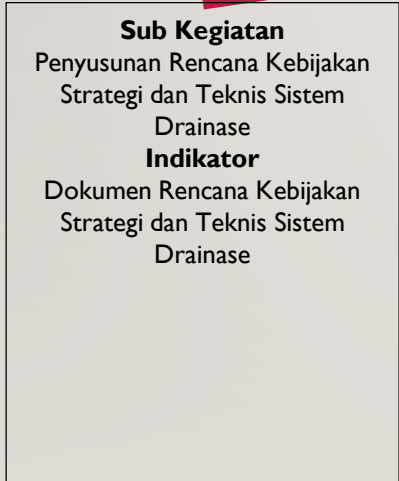
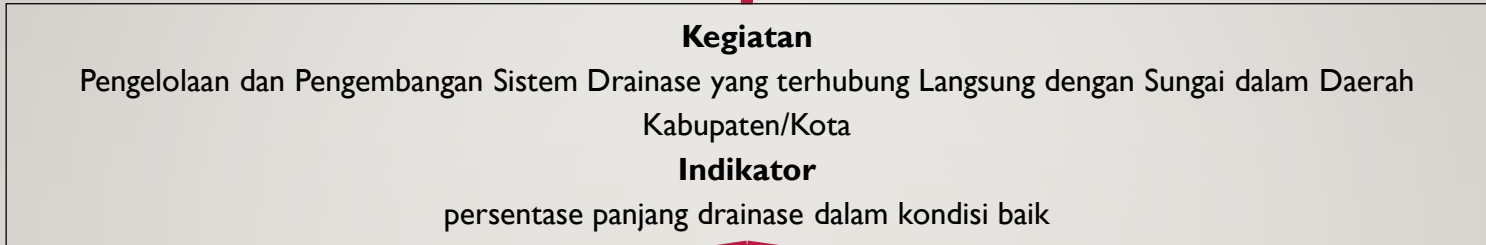
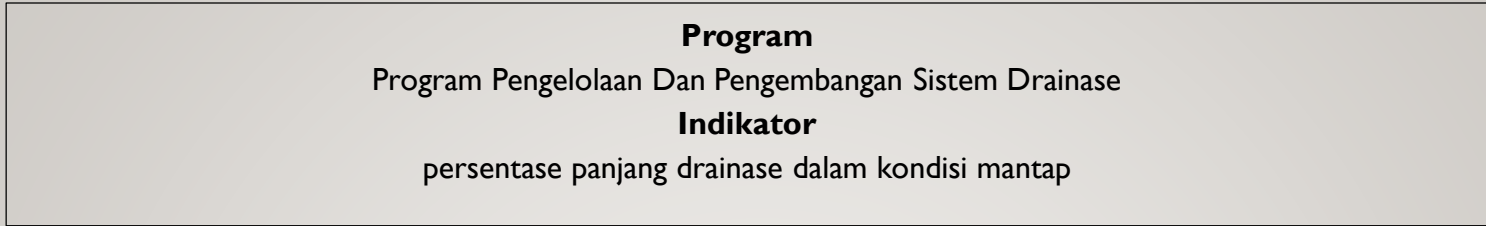
(%) penduduk berakses air bersih layak

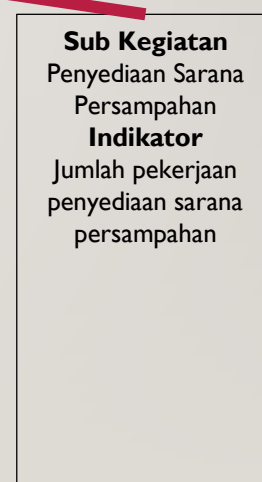
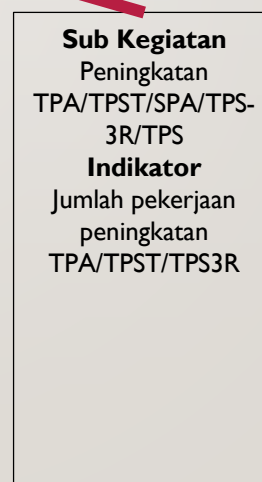
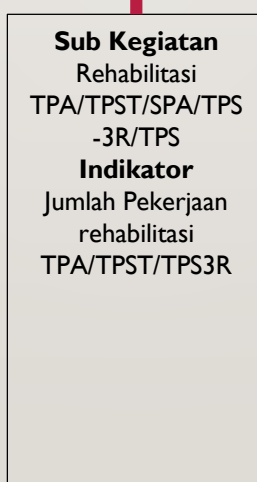
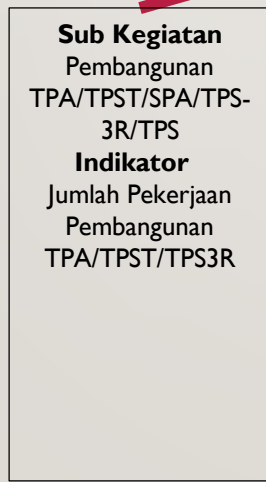
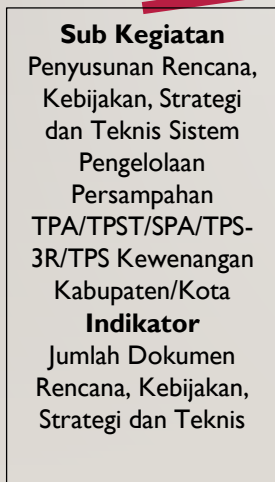
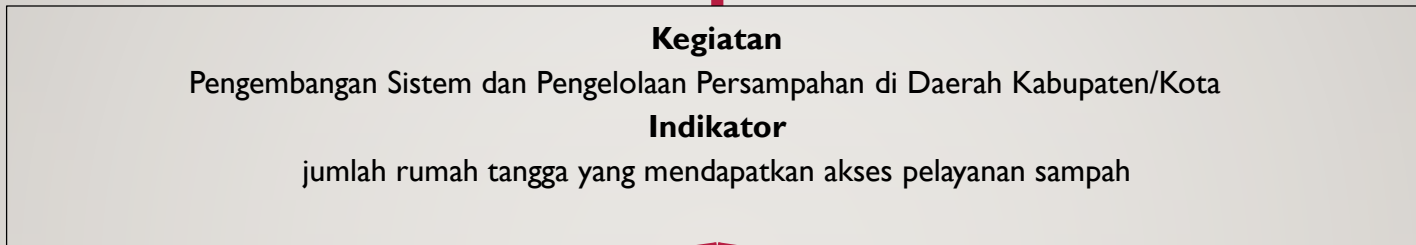
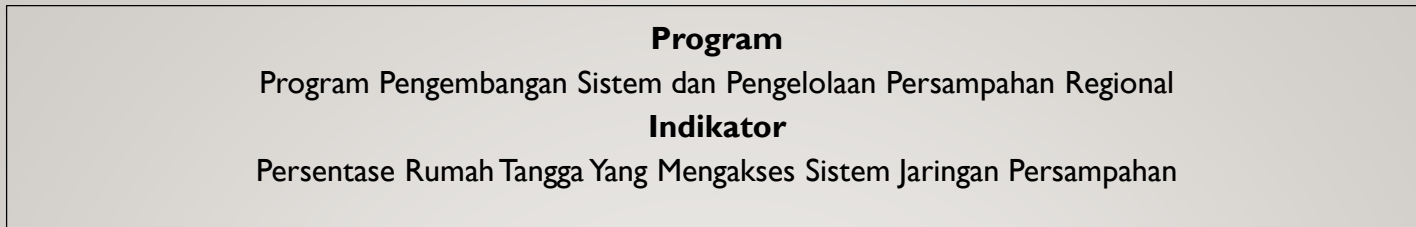
SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang tersusun
Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM yang dilaksanakan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Program
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Indikator
Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sanitasi Layak

Kegiatan
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses Sistem Air Limbah Domestik

<p>Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Indikator Jumlah Pekerjaan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</p>	<p>Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Indikator Jumlah pekerjaan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja</p>	<p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Indikator Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja</p>	<p>Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT Indikator Jumlah pekerjaan pembangunan/penyediaan sarana prasarana IPLT</p>	<p>Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT Indikator Jumlah Pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT</p>	<p>Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT Indikator Jumlah Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT yang disupervisi</p>
---	--	--	---	--	--	---





Sasaran 3
Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air
Indikator
Persentase Ketersediaan Air Baku



Program
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Indikator
Persentase bangunan air/ Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik

Kegiatan
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
persentase jumlah bangunan air dalam kondisi baik

Kegiatan
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah/Kabupaten/Kota
Indikator
Persentase jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik

Sub Kegiatan
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator
Dokumen Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
Indikator
Terbangunnya Embung dan Penampung Air

Sub Kegiatan
Normalisasi/ Restorasi / pemeliharaan Sungai
Indikator
Terbangunnya Pengamanan Sungai

Sub Kegiatan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Indikator
Panjang jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi

Sub Kegiatan
Operasional dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Indikator
Panjang jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi

Sub Kegiatan
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air irigasi
Indikator
Dokumen Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air irigasi

Sasaran 4
Meningkatnya perwujudan rencana tata ruang daerah
Indikator
Capaian perwujudan program rencana tata ruang

Program
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Indikator
Pertumbuhan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR

Kegiatan
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Indikator
Capaian tahapan yang disyaratkan dalam penetapan RTRW dan RRTR (%)

Kegiatan
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
Capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dalam 1 tahun

Kegiatan
Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
Pertumbuhan kesesuaian permohonan pemanfaatan ruang

Kegiatan
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
Tingkat penyelesaian permasalahan penataan ruang

Sub Kegiatan
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Indikator
Capaian pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RTRW

Sub Kegiatan
Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Indikator
Capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten

Sub Kegiatan
Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
Indikator
Tingkat penyelesaian persetujuan dan/atau konfirmasi KKPR

Sub Kegiatan
Koordinasi dan sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Indikator
Tingkat penyelesaian penertiban/penegakan hukum terhadap penyimpangan bidang penataan ruang

Sub Kegiatan
Pelaksanaan persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Indikator
Capaian pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi, Evaluasi dan Penetapan RRTR

Sub Kegiatan
Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
Indikator
Capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten

Sub Kegiatan
Sistem Informasi Penataan Ruang
Indikator
Ketersediaan homepage penataan ruang beserta sub-sub domainnya dan/atau penambahan sub domain dan/ atau update data pada subdomain

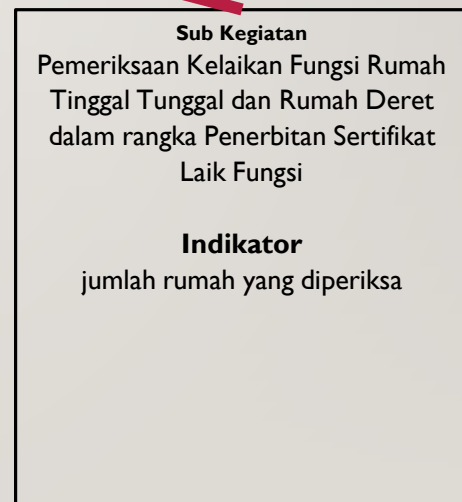
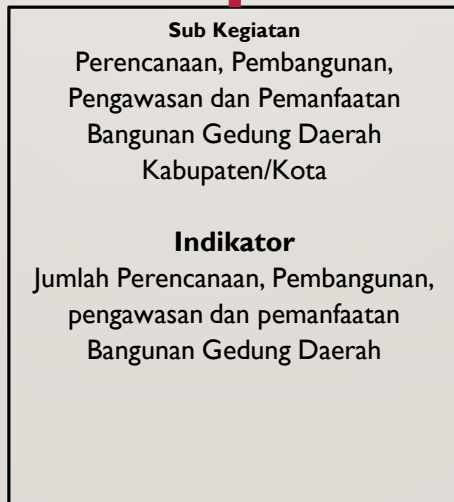
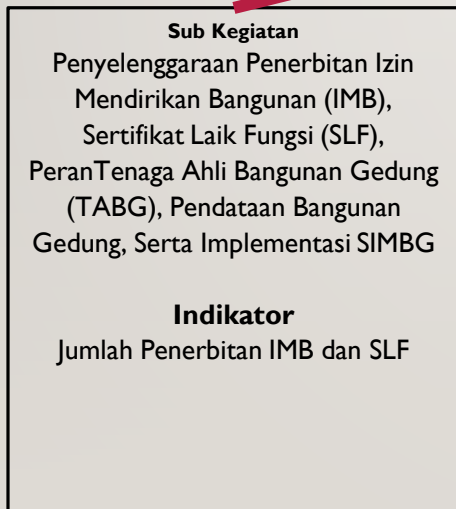
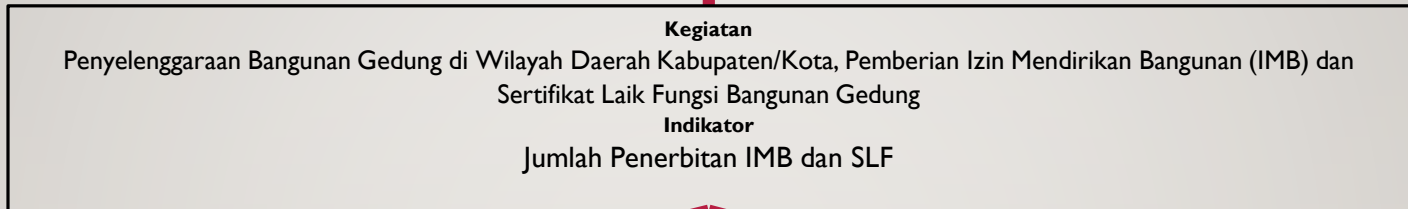
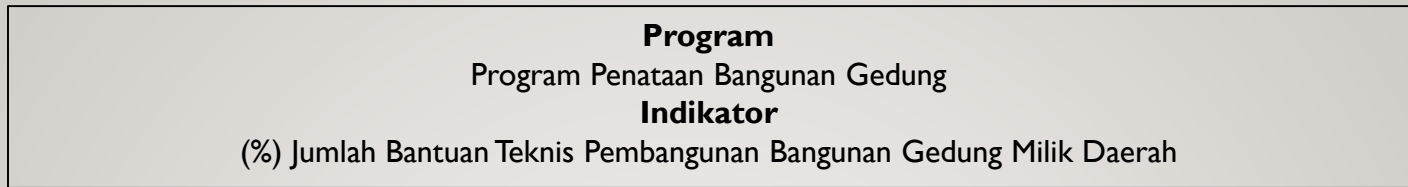
Sub Kegiatan
Koordinasi pelaksanaan penataan ruang
Indikator
Capaian pelaksanaan penilaian persetujuan dan/atau konfirmasi KKPR

Sasaran 5
Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya
serta layanan jasa konstruksi
Indikator
% Pertumbuhan Bantuan Teknis Bangunan Gedung dan Jasa konstruksi

Program
Program Penataan Bangunan Gedung
Indikator
(%) Jumlah Bantuan Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Milik
Daerah

Program
Program Penataan Bangunan Gedung
Dan Lingkungannya
Indikator
(%) Jumlah Bantuan Teknis Penataan
Bangunan Gedung Dan
Lingkungannya

Program
Program Pengembangan Jasa
Konstruksi
Indikator
pertumbuhan % ketertiban dalam
penyelenggaraan konstruksi



Program
Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya
Indikator
(%) Jumlah Bantuan Teknis Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya

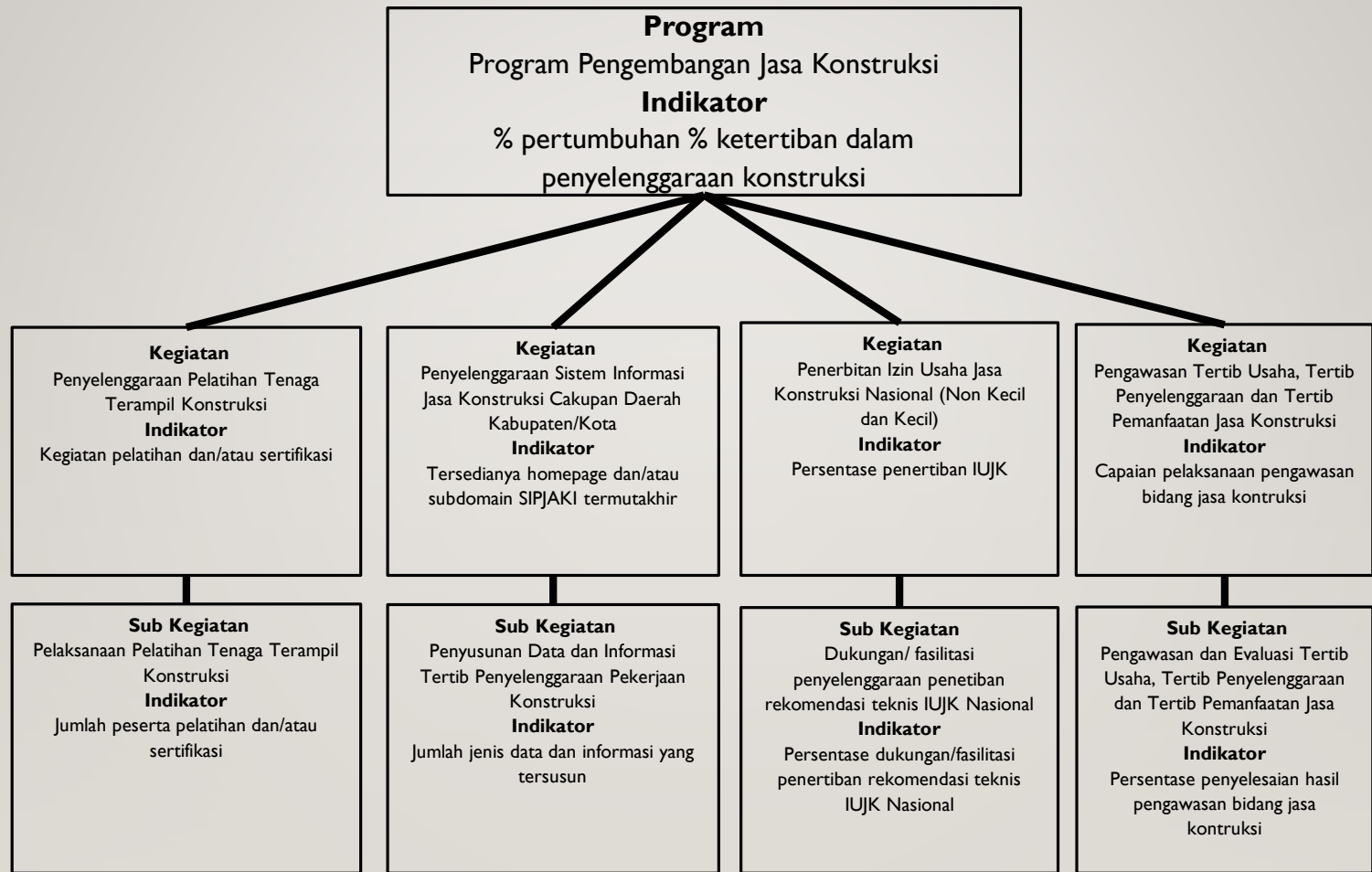
Kegiatan
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
Jumlah Perencanaan, Pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah

Sub Kegiatan
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
Indikator
Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Indikator
Bangunan dan Lingkungan yang di tata

Sub Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
Indikator
Jumlah Masyarakat yang di berdayakan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan

Sub Kegiatan
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
Indikator
Monitoring yang tepat sasaran sesuai dengan pelaksanaan



Sasaran 6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
Nilai SAKIP OPD



Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator
Nilai SAKIP OPD DPU

<p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p>	<p>Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Indikator Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	<p>Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Indikator Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Indikator Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Sub Kegiatan	Indikator
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan	Indikator
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

	Sub Kegiatan	Indikator
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

	Sub Kegiatan	Indikator
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan
7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Sub Kegiatan	Indikator
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan
7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Sub Kegiatan	Indikator
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan
5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Sub Kegiatan	Indikator
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Sub Kegiatan	Indikator
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi



001 10021330 100401 1 001
 001000 1000001
 001000 1000001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

@dputarurembangkab
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Rembang

sebagai

Akun Media Sosial Terinteraktif Tahun 2025

Atas dedikasi, kreativitas, dan konsistensi
dalam menghadirkan konten
informatif bagi publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang



Drs. EC GANTIARTO St
NIP. 19651226 199401 1 001